



# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022



DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>9</b>
1.1. Gambaran Umum	11
1.2. Dasar Hukum	11
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	11
1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi	17
1.4.1. Dukungan Persidangan dan Diplomasi Parlemen	17
1.4.2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	18
1.4.3. Penguatan Tata Laksana Kearsipan	20
1.4.4. Strategi Pemberitaan	21
1.4.5. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	22
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>24</b>
2.1. Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan 2021–2024	24
2.1.1. Visi	24
2.1.2. Misi	25
2.1.3. Tujuan	26
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022	26
2.2.1. Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022	26
2.2.2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022	28
2.3. Metode Penghitungan Kinerja	29
2.3.1. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga	29
2.3.2. Hasil Penilaian terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik	30
2.3.3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	31
2.3.4. Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang Persidangan	32
2.3.5. Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Deputi Bidang Persidangan	33
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>34</b>
3.1. Hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR RI	35
3.2. Hasil Penilaian terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik	43
3.2.1. Target dan Realisasi	43
3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja	46
3.2.3. Capaian dan Target Jangka Menengah	47
3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	48
3.2.5. Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan	49
3.2.6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja	50
3.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
3.3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan	56
3.4. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	69
3.5. Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Deputi Bidang Persidangan	77
3.6. Realisasi Anggaran	85
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>90</b>
4.1. Kesimpulan	90
4.2. Rekomendasi	92
LAMPIRAN	94

**TIM PENYUSUN****Pengarah**

Suprihartini, S.I.P., M.Si.

**Ketua**

Rachmi Suprihartanti Septiningtyas, S.H., M.H.

**Sekretaris**

Abdul Rahman, S.I.P.

**Anggota**

Nofia Dewita, S.S., M.Si.

Dra. Etmita Ardem, M.Si.

Rosdiana, S.H., M.H.

Eguh Setiawan, S.I.P.

Sagung Agung Puti S.Y., S.H., M.H.

Siti Nur Aidah, S.A.P., M.A.P.

Haryanti, S.A.B., M.A.P.

Aji Nurhadi Wibowo, S.E., M.A.P.

Eny Sulistiowati, S.Kom.

Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si.

Tuti Alawiyah, A.Md., S.Tr.A.P.

N.A.A. Titie Budi Setyawati, S.E., M.E.

Aprilia Dessy Kurniati, S.E.

Dicky Rachmadi, S.A.P.

Nita Juwita, S.Sos.

Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom., M.A.

Husnul Latifah, S.Sos.

M. Chairudin, S.Sos., M.M.

Agus Budi Leksono, S.A.P.

Puji Lestari, S.E.

Renaldi Setiawan, S.I.P.

Wilda Marsella Kappuw, A.Md.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja ini berisi mengenai perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi dan *achievement* yang telah dicapai selama tahun 2022, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua peraturan tersebut selanjutnya diinternalisasi ke dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

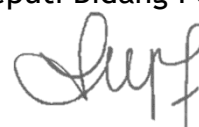
Laporan kinerja (LKj) tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan refleksi kinerja bagi Deputy Bidang Persidangan atas apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan di tahun 2023 sehingga lebih lebih produktif, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi yaitu **“Menjadi Deputy Bidang Persidangan yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”**.

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Persidangan Setjen DPR RI Tahun 2022 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis seluruh target indikator kinerja dan sejumlah identifikasi yang bermanfaat bagi perbaikan kinerja dimasa datang dalam rangka memberikan layanan dan dukungan teknis administratif serta persidangan kepada Anggota Dewan dalam melaksanakan fungsinya yaitu fungsi legislatif, pengawasan, anggaran juga fungsi diplomasi parlemen serta fungsi strategis lainnya dengan melakukan strategi komunikasi dan menyampaikan informasi berbagai program dan kebijakan Dewan yang berdampak luas pada masyarakat.

Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh jajaran di bawah Deputi Bidang Persidangan atas kerja keras dan loyalitas yang tinggi yang telah mendukung kinerja di Deputi Bidang Persidangan sehingga dapat meningkat dari tahun sebelumnya, juga ucapan terimakasih kepada pihak Kementerian/Lembaga yang telah bekerjasama mendukung seluruh kegiatan persidangan dan rapat-rapat di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. Semoga kerjasama yang baik dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya Deputi Bidang Persidangan meningkatkan kualitas layanan kepada anggota DPR RI menjadi lebih baik lagi.

Kami berharap laporan kinerja (LKj) tahun 2022 ini dapat bermanfaat dalam pengukuran kinerja Deputi persidangan Setjen DPR RI dan Kami selalu membuka diri terhadap masukan, baik kritik, saran maupun pandangan konstruktif yang ditujukan untuk kesempurnaan laporan kinerja Deputi Bidang Persidangan.

Jakarta, Januari 2023  
Plt. Deputi Bidang Persidangan,



Suprihartini, S.IP., M.Si  
Nip. 19710106 199003 2 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk akuntabilitas, Deputi Bidang Persidangan, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maupun dalam mengelola anggaran 2022, telah menyusun Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan wujud transparansi terkait pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, serta sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun mendatang sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 7 Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada Tahun 2022, Deputi Bidang Persidangan menetapkan perjanjian kinerja sesuai dengan indikator yang telah disempurnakan yaitu terdiri atas 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja utama. Dalam hal ini, Indikator Kinerja Deputi Persidangan harus selaras dengan indikator kinerja Sekjen DPR RI.

Adapun capaian kinerja Deputi Bidang Persidangan sebagaimana terlihat dari capaian kinerja Satker Setjen sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil capaian kinerja di atas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang sesuai target yakni indikator kinerja hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik dengan realisasi "*informatif*" dan indikator kinerja nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan dengan realisasi "*B*". Disamping itu, terdapat pula 2 (dua) indikator kinerja yang melebihi target yakni indikator kinerja indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan dari target "*3,24*", telah terealisasi menjadi "*3,31*" serta indikator kinerja indeks Reformasi



Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan dari target “A” telah terealisasi menjadi “AA”.

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja hasil pengawasan kearsipan lembaga belum memenuhi target yang telah ditentukan, yakni dari target “A” telah terealisasi “BB”. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak sumber daya manusia (SDM) unit kerja yang belum mengikuti diklat kearsipan, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta unit pengolah banyak yg belum melakukan penyusutan arsip (pemindahan arsip ke unit kearsipan). Meskipun demikian, capaian kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan secara umum, tetap dapat berjalan dengan lancar dan berhasil mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
01	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga	A	BB
		Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif	Informatif
02	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3.24	3,31
03	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	A	AA
		Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B

Untuk mencapai sasaran strategis Deputi Bidang Persidangan Satker Setjen pada Tahun 2022, terdapat alokasi anggaran adalah sebesar Rp200.805.791.000,. Kemudian untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Persidangan dari pagu anggaran yang dialokasikan tersebut, sampai dengan bulan Desember 2022, telah terealisasi sebesar Rp198.219.778.187,- atau 98,71% dari alokasi anggaran yang ada. Pada tahun 2022 ini, terdapat

kenaikan 1,3% untuk realisasi anggarannya, yang mana sebelumnya pada tahun 2021 telah terealisasi sebesar 97,39%. Monitoring dan optimalisasi anggaran dilingkungan Deputi Bidang Persidangan adalah merupakan kunci keberhasilan atas kinerja anggaran tersebut.

Dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Deputi Bidang Persidangan secara keseluruhan dalam menghadapi berbagai tantangan kedepan, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan kinerja sebagai berikut:

1. Pengembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPR-RI dan masyarakat, yaitu dengan transparansi informasi dan kinerja kegiatan parlemen di website DPR RI, serta berbagai inovasi dan penyempurnaan aplikasi system kerja modern yang efektif dan efisien yang mendukung supporting system menuju parlemen yang modern;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang unggul dan memiliki penguasaan substansi untuk penguatan dukungan keahlian kepada DPR RI dengan tetap menerapkan nilai Budaya Kerja Setjen DPR RI yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif,

## Ringkasan Eksekutif

### Perjanjian Kinerja (Satker Setjen) Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022

**Terwujudnya tata  
kelola pemerintahan  
di Setjen DPR RI  
yang berkualitas**



- Hasil Pengawasan  
Kearsipan Lembaga

**BB**



- Hasil penilaian terhadap  
implementasi standar teknis  
layanan informasi publik

**INFORMATIF**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Gambaran Umum**

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 maka dibentuk organisasi pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Deputi Bidang Persidangan merupakan salah satu unit kerja eselon I di Sekretariat Jenderal DPR RI yang mempunyai peran strategis dalam memberikan dukungan layanan persidangan paripurna, rapat-rapat di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), layanan keprotokolan dan kehumasan, serta pemberitaan. Hal ini sesuai dengan Rencana Strategis DPR RI yang mengacu pada visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dengan demikian, setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan dukungan persidangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan wujud transparansi terkait dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR, alat penilaian kinerja, serta sebagai upaya guna peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI adalah amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Meski masih dalam situasi pandemi Covid-19, organisasi Deputi Bidang Persidangan senantiasa merespon tuntutan Dewan dengan baik dan cepat, serta berusaha beradaptasi dengan perubahan yang ada (*disrupsi*). Salah satunya dengan menerapkan *hybrid meeting* pada rapat-rapat DPR RI agar tercipta kolaborasi dan produktivitas kinerja sebagaimana yang diharapkan, baik pada persidangan paripurna maupun persidangan di AKD.

Terhitung mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai ditunjuk Pejabat Definitifnya, nakhoda di Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dijabat oleh Ibu Suprihartini, S.IP, M.Si sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Persidangan. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Kepala Biro Persidangan I yang membawahi Bagian Sekretariat Komisi, Bagian Persidangan Paripurna, dan Bagian Risalah, sehingga sangat linier dengan jabatan yang diemban saat ini. (Berdasarkan Surat Tugas No : 07/SP/SETJEN DPR RI/03/2022 Tanggal 7 Maret 2022)

## 1.2. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada:
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 24 Tahun 2021;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Persidangan berupaya menerapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara, yang meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik

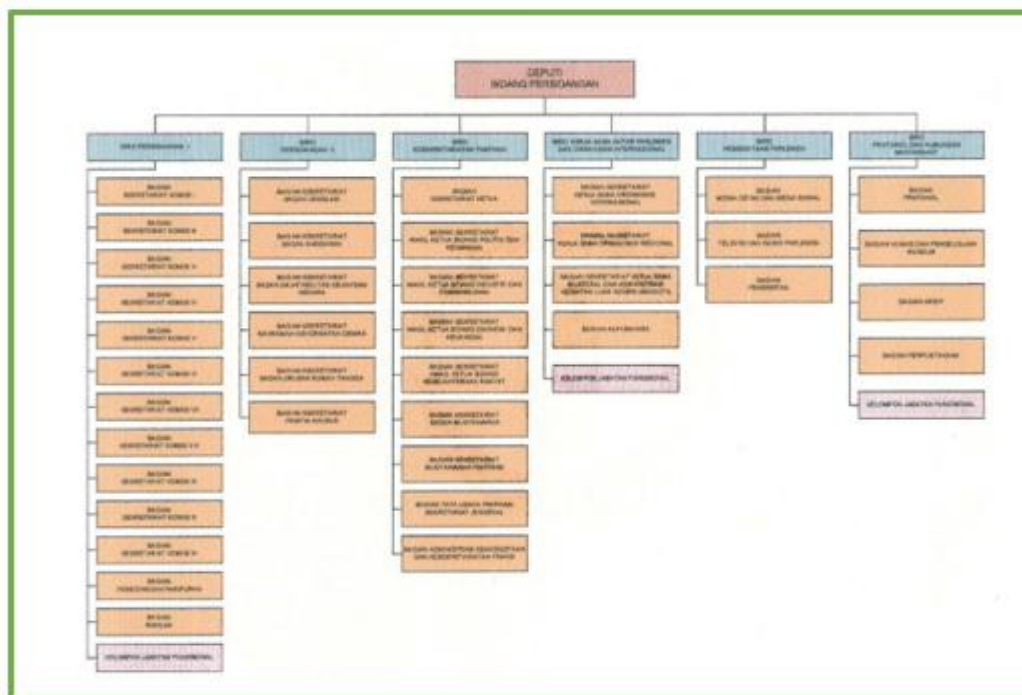
Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020. Adapun tugas dan fungsi Deputi Bidang Persidangan adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Persidangan;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kesekretariatan kepada pimpinan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemberitaan;
- g. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; dan
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal.

Deputi Bidang Persidangan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal dan bertugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Deputy Bidang Persidangan didukung oleh 519 pegawai, yang terdiri dari eselon I sebanyak 1 orang, eselon II sebanyak 6 orang, eselon III sebanyak 39 orang, eselon IV sebanyak 82 orang, jabatan fungsional sebanyak 86 orang, dan jabatan pelaksana sebanyak 306 orang, dengan struktur organisasi sebagaimana gambar berikut ini :

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Deputy Bidang Persidangan**  
**Setjen DPR RI**



Dibandingkan dengan unit kerja Eselon I lainnya, jumlah sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Deputy Bidang Persidangan menempati urutan teratas (Tabel 1). Jumlah pegawai yang cukup besar ini dapat menjadi kekuatan untuk dioptimalkan dalam menjalankan tugas dan fungsi Deputy Bidang Persidangan.

**Tabel 1**  
**Jumlah Pegawai di Setjen DPR RI**

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Deputi Bidang Persidangan	519
2	Deputi Bidang Administrasi	503
3	Inspektorat Utama	60
4	Badan Keahlian	205
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	27
6	Pusat Teknologi Informasi	35
<b>Total</b>		<b>1.349</b>

Adapun jumlah pegawai berdasarkan usia, jumlah pegawai terbesar berada di rentang usia 51 tahun - 60 tahun dengan jumlah sebanyak 177 pegawai atau 34% dari jumlah pegawai (Tabel 2). Selanjutnya, di tempat kedua diisi oleh pegawai dengan rentang usia 41 tahun - 50 tahun dengan jumlah sebanyak 173 pegawai atau 33% dari jumlah pegawai. Pemetaan jumlah pegawai berdasarkan rentang usia ini sangat penting dalam melakukan tranformasi teknologi informasi. Secara umum, semakin muda rentang usia pegawai maka semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan semakin tua rentang usia pegawai maka semakin resisten.

**Tabel 2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia di lingkungan Deputi Bidang Persidangan**

No.	Rentang Usia	Jumlah	Persentase
1	51 – 60 tahun	177	34 %
2	41 - 50 tahun	173	33 %
3	31 - 40 tahun	82	16 %
4	30 tahun ke bawah	87	17 %
<b>Total</b>		<b>519</b>	



Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang berpendidikan minimal Sarjana berjumlah 342 orang atau 66% dari jumlah pegawai di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. Persentase tersebut di atas rata-rata kesetjenan yang mencapai 64%. Adapun untuk tingkat Pendidikan diploma sebesar 52 orang atau 10%, lebih rendah dibandingkan rata-rata kesetjenan yang mencapai 11,86%. Untuk tingkat Pendidikan SLTA ke bawah mencapai 125 orang atau 24%, sama dengan rata-rata kesetjenan. Pemetaan pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan sangat penting karena dengan Pendidikan yang baik, seseorang memiliki kemampuan dan dapat dengan mudah mengembangkan diri dalam bidang kerjanya. Salah satu cara untuk meningkatkan kapabilitas pegawai dengan pemberian diklat atau tugas belajar.

**Tabel 3**

**Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan di lingkungan Deputi Bidang Persidangan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 1 – Strata 3	342
2	Diploma I – Diploma III	52
3	SD – SLTA	125
<b>Total</b>		<b>519</b>

Berdasarkan Pasal 183 Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa Deputi Bidang Persidangan terdiri atas enam Biro, yaitu:

**1. Biro Persidangan I**

Biro Persidangan I mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan komisi dan persidangan paripurna, serta pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Biro persidangan I terdiri atas tiga belas bagian atau unit kerja, yaitu Bagian Sekretariat Komisi I sampai dengan Sekretariat Komisi XI, Bagian Persidangan Paripurna, dan Bagian Risalah.

## 2. **Biro Persidangan II**

Biro Persidangan II mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan kepada badan, mahkamah, dan panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Biro Persidangan II terdiri atas enam bagian atau unit kerja, yaitu Bagian Sekretariat Badan Legislasi, Bagian Sekretariat Badan Anggaran, Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga, dan Bagian Sekretariat Panitia Khusus.

## 3. **Biro Kesekretariatan Pimpinan**

Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Sekretariat Jenderal, dukungan persidangan kepada Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan, serta pengelolaan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi. Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri atas sembilan bagian atau unit kerja, yaitu Bagian Sekretariat Ketua, Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan, Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan, Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bagian Sekretariat Badan Musyawarah, Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan, Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal, dan Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi.

## 4. **Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional.**

Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerja sama antar parlemen dan organisasi internasional serta layanan alih bahasa. Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional terdiri atas lima bagian atau unit kerja, yaitu Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional, Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional, Bagian Sekretariat Kerja

Sama Bilateral dan Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota, dan Bagian Alih Bahasa.

#### **5. Biro Pemberitaan Parlemen**

Biro Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan. Biro Pemberitaan Parlemen terdiri atas tiga bagian atau unit kerja, yaitu Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Bagian Televisi dan Radio Parlemen, dan Bagian Penerbitan.

#### **6. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat**

Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan keprotokolan dan kehumasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal, serta pengelolaan arsip dan perpustakaan. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat terdiri atas empat bagian atau unit kerja, yaitu Bagian Protokol, Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum, Bagian Arsip, dan Bagian Perpustakaan.

### **1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi**

#### **1.4.1. Dukungan Persidangan dan Diplomasi Parlemen**

Dalam rangka Representasi Rakyat, Penyelenggaraan persidangan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan fungsi parlemen. Semua pengambilan keputusan Parlemen dilakukan secara formal dalam persidangan. Sidang-sidang Parlemen yang terbuka menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Parlemen yang akuntabel dan transparan.

Deputi Persidangan yang merupakan salah satu unsur dalam Sekretariat Jenderal DPR memainkan peranan penting dalam mewujudkan persidangan bagi peningkatan kualitas Representasi Rakyat dan mewujudkan kemudahan akses informasi atas hasil-hasil persidangan.

Deputi Bidang Persidangan merupakan ujung tombak dalam memberikan dukungan layanan persidangan dan diplomasi parlemen. Di dalam pemberian layanan persidangan, Deputi Bidang Persidangan membantu menyiapkan pelaksanaan kegiatan rapat dan tata usaha sidang paripurna, Komisi, Badan, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Panitia Khusus.

Di samping itu, Deputi Bidang Persidangan juga membantu terselenggaranya rapat Pimpinan DPR RI berupa rapat Badan Musyawarah dan Musyawarah Pimpinan.

Deputi Bidang Persidangan juga terlibat dalam mendukung terlaksananya diplomasi parlemen berupa kegiatan menghadiri konferensi, seminar, lokakarya antar parlemen, baik regional maupun internasional, pelaksanaan sidang internasional, kunjungan diplomasi Alat Kelengkapan Dewan dan kunjungan kerja luar negeri Anggota dalam rangka peran diplomasi.

#### **1.4.2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia**

Secara kuantitas, jumlah PNS di lingkungan Deputi Bidang Persidangan masih belum ideal bila disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja. Berdasarkan Keputusan Sekjen Nomor 2426/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Kebutuhan PNS di lingkungan Deputi Bidang Persidangan berjumlah 1.155 orang, sedangkan PNS yang ada saat ini hanya 519 orang sehingga masih diperlukan tambahan sebanyak 633 orang (Tabel 4). Jumlah kebutuhan tenaga PNS tersebut melebihi jumlah pegawai yang ada saat ini dan secara langsung dapat mempengaruhi kinerja Deputi Bidang Persidangan dalam memberikan layanan persidangan dan diplomasi parlemen.

**Tabel 4**  
**Analisis Beban Kerja**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	KEBUTUHAN PEGAWAI	SELISIH	
				(+)	(-)
1	Deputi Bidang Persidangan	0	1	0	-1
2	Kepala Biro Persidangan I	149	279	2	-130
3	Kepala Biro Persidangan II	53	72	0	-19
4	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	131	215	7	-91
5	Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	40	63	1	-24
6	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	69	315	5	-251
7	Kepala Biro Protokol dan Hubungan	77	210	2	-135
<b>JUMLAH</b>		<b>519</b>	<b>1155</b>	<b>17</b>	<b>-650</b>
<b>KEKURANGAN PEGAWAI</b>				<b>633</b>	

Ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menutup kebutuhan tersebut yaitu melalui rekrutmen tenaga PNS dan melalui mekanisme mutasi. Untuk rekrutmen tenaga PNS sangat sulit dilakukan karena pemerintah saat ini tidak membuka lagi formasi penerimaan CPNS, sehingga solusi sementara yang dapat dilakukan dengan merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pengaturan tentang PPNASN sebelumnya diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sejalan dengan waktu, Pemerintah pada tahun 2018 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Untuk itu diperlukan sinkronisasi pengaturan mengenai Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (PPNASN) di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka pada tahun 2022 Sekretariat Jenderal telah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal No.

24 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tenaga Sistem Pendukung Sekretariat Jenderal DPR RI.

Adapun dengan mekanisme mutasi, Deputi Bidang Persidangan dapat mengusulkan kriteria pegawai yang akan ditempatkan berdasarkan kebutuhan unit organisasi sehingga diperoleh *the right man in the right place*

### 1.4.3. Penguatan Tata Laksana Kearsipan

Unit Arsip Setjen DPR RI berada di bawah Deputi Bidang Persidangan sejak tahun 2021, yang sebelumnya berada di bawah Deputi Bidang Administrasi. Unit Arsip bertugas mengelola seluruh arsip yang ada di DPR RI dan Setjen DPR RI. Dua tahun setelah bergabung di Deputi Bidang Persidangan, unit arsip perlu melakukan berbagai penyesuaian untuk dapat memenuhi kebutuhan organisasi atas layanan kearsipan.

Pada tahun 2022, target kinerja indikator hasil pengawasan kearsipan DPR RI belum tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain pembuatan naskah dinas yang belum sesuai dengan tata naskah dinas sehingga menyulitkan proses pengarsipan, belum adanya SDM kearsipan (arsiparis dan pengelola arsip) di unit kerja pengolah, pegawai pengadministrasi umum di lingkungan Setjen DPR RI banyak yang belum memahami kearsipan, pemindahan arsip yang belum secara rutin dilakukan oleh unit pengolah ke Bagian Arsip, pembuatan daftar arsip oleh unit pengolah yang belum sesuai standar, belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang kearsipan. Untuk itu strategi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Memberikan bimbingan teknis oleh Pusdiklat bekerja sama dengan Bagian Arsip, sedangkan pembinaan kearsipan dilaksanakan oleh Bagian Arsip secara periodik kepada pegawai di setiap unit kerja.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan arsip, antara lain perlengkapan kearsipan (lemari arsip, sekat arsip, dan folder arsip), fasilitas untuk rapat *hybrid* (kamera *robotic*, alat rekam,



*sound system*, layar proyektor, jaringan *Local Area Network* (LAN), jaringan internet berkecepatan tinggi, komputer dan kamera eksternal, laptop), mesin fotokopi warna dengan kecepatan tinggi, eksternal *hard disk*, printer, ruang kerja yang memadai dan sesuai standar.

#### 1.4.4. Strategi Pemberitaan

Deputi Bidang Persidangan juga membawahi Biro Pemberitaan Parlemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan. Dalam tahun 2022, dalam hal pengelolaan Pemberitaan DPR, berbagai inovasi telah dilakukan, antara lain Program-program unggulan TV Parlemen yang menyajikan berita seputar kegiatan DPR melalui program-program unggulan tersebut dan telah disebar pada beberapa media nasional. Program-program unggulan tersebut juga melibatkan partisipasi Publik, sehingga diharapkan kerja-kerja DPR dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi masyarakat atas kinerja Pemberitaan DPR RI di tahun 2022 Biro Pemberitaan DPR RI mendapatkan beberapa penghargaan antara lain Penghargaan Indonesia Award 2022 dari I-News untuk Katagori *Digital Transformation*, Penghargaan dari Radio Sonora Katagori *Excellent Government Appreciation Award* Tahun 2022, dan Penghargaan Elshinta Award Katagori Mitra Kontributif.

Beberapa kegiatan khusus yang berskala nasional dan internasional juga telah diliput dan disebar dengan baik, antara lain *The 144<sup>th</sup> Inter-Parliamentary Union Assembly dan Other Related Meetings*, Sidang Bersama DPR dan DPD dan Sidang RAPBN serta Pelaksanakan *The G20 Parliamentary Speakers Summit* (P20). Dalam penyelenggaraan kegiatan diatas TV Parlemen menjadi menjadi satu-satunya televisi yang memiliki akses untuk dapat meliput kegiatan tersebut dan stasiun televisi lainnya mengambil hasil peliputan untuk disiarkan.

Untuk memberikan dukungan kepada DPR RI dalam proses pengambilan kebijakan serta monitoring berbagai isu yang berkembang di masyarakat, Biro

Pemberitaan Parlemen melakukan analisis media baik cetak maupun elektronik untuk diolah menjadi suatu kajian dan rekomendasi atas isu-isu aktual yang disampaikan secara berkala. Hasil kajian dan rekomendasi tersebut dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Pada tahun 2021, telah dilakukan inovasi/terobosan dalam penyajian informasi seputar kegiatan DPR, yaitu Penerbitan Digital (*E-Publishing*) yaitu pembangunan *Platform Digital* aplikasi dan *website E-Media*, yang mengoptimalkan keterpaduan proses, mulai dari produksi, distribusi dan publikasi. Dalam tahun 2022, inovasi ini terus dikembangkan dan ditingkatkan dalam penyajiannya. Data dan informasi yang nantinya dapat diintegrasikan kedalam *News Room* yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, untuk kepentingan peningkatan performa kelembagaan DPR RI.

Berbagai aktivitas diatas menghasilkan data dan informasi yang saat ini tersimpan di *Platform Website* dan aplikasi *E-Media* DPR RI. Data dan informasi tersebut merupakan aset kelembagaan yang perlu dikelola untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan. Data dan informasi tersebut perlu diintegrasikan dalam suatu *Maha Data (Big Data)* sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal yang membutuhkan dukungan data dan informasi.

#### 1.4.5. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Sebagaimana SK Sekjen Nomor 2257/SEKJEN/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI menunjuk Kepala Biro Protokol dan Humas sebagai PPID Setjen DPR RI. Sehingga secara pengorganisasian PPID Setjen DPR RI berada di bawah Deputi Bidang Persidangan, yang sebelumnya berada di bawah Deputi Bidang Administrasi. Tugas dan fungsi PPID adalah mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Fungsi pengkoordinasian ini meliputi aspek layanan, produksi, penyimpanan, dan pendokumentasian informasi publik.

Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat pada tahun 2022 terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di DPR RI dan Setjen DPR RI, PPID Setjen DPR RI mendapat point 98,13. Jika dibandingkan dengan indeks tahun 2021 (96,52) terdapat **kenaikan 1,61** poin. Kenaikan ini merupakan hasil dari upaya PPID Setjen DPR RI yang terus memperbaiki berbagai aspek dalam pengelolaan dalam informasi publik baik dalam aspek layanan permohonan informasi publik, pengelolaan informasi publik dan pendokumentasian informasi publik.

Dalam upaya peningkatan tata kelola layanan informasi publik, layanan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Setjen DPR RI telah diikutsertakan dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kemenpan RB. Di samping itu PPID Setjen DPR RI juga menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk menjaring masukan masyarakat dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik. Laporan FKP yang diselenggarakan oleh PPID Setjen DPR RI menjadi salah satu bagian aspek yang dilaporkan kepada Menpan RB untuk memenuhi amanat Permenpan berkaitan dengan layanan informasi.

PPID terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja keterbukaan informasi publik di DPR RI dan Setjen DPR RI. Aspek yang menjadi agenda perbaikan terdepan antara lain adalah aspek penguatan kompetensi SDM pelayanan, penguatan pengkoordinasian antar unit kerja pemproduksi informasi publik, dan penguatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengefektifkan dan mengefisienkan layanan informasi publik.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Deputi Bidang Persidangan 2021–2024**

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi DPR RI untuk menjadi Lembaga Perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel, maka Setjen

DPR RI menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2021-2024 yang mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024. Renstra Deputy Bidang Persidangan merupakan turunan dari Renstra Sekretaris Jenderal DPR RI yang mencerminkan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan. Berikut ini adalah visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI 2021-2024 sebagai berikut :

### 2.1.1. Visi

Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas Deputy Bidang Persidangan, maka Renstra Deputy Bidang Persidangan memuat visi jangka panjang sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan yang telah dirumuskan dalam visi Sekretariat Jenderal DPR RI. Apa yang harus dicapai oleh Deputy Bidang Persidangan dalam lima tahun ke depan harus selaras dengan visi Sekretariat Jenderal DPR RI. Adapun visi Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, yaitu :

**“ Menjadi Deputy Bidang Persidangan yang Profesional dan Modern dalam Mendukung Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”**

Profesional artinya, Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan Modern artinya, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Sekretariat Jenderal DPR RI yang didukung oleh Deputi Bidang Persidangan untuk menjadikan jajarannya berkinerja lebih profesional melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemudahan mendapatkan akses informasi bagi publik guna mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 2.1.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI. Misi Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2021-2024 adalah.

1. memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI;
2. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
3. menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.

Untuk menjalankan tugasnya, Deputi Bidang Persidangan mengacu dan berpegang teguh pada visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI.

### 2.1.3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, Deputi Bidang Persidangan menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai hingga dua tahun ke depan, yaitu.

1. terwujudnya dukungan persidangan, administrasi yang tepat, cepat, dan akurat yang dibutuhkan oleh DPR RI;

2. terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. terwujudnya dukungan keterbukaan informasi publik dan pemerintahan berbasis elektronik.

## **2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022**

### **2.2.1. Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2022**

Di dalam Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI terdapat tiga sasaran yang memuat sebelas indikator kinerja utama. Indikator kinerja tersebut selaras dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2020-2024. Pencantuman Perjanjian Kinerja (PK) Setjen DPR RI Tahun 2022 dalam laporan ini sangat dibutuhkan untuk melihat keselarasan antara PK Sekjen DPR RI dan PK Deputy Bidang Persidangan.



**Tabel 2**  
**Perjanjian Kinerja Sekjen DPR RI Tahun 2022**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
			2022
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan	3,24
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		3. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		4. Hasil penilaian maturitas SPIP	Level 3
		5. Hasil penilaian kapabilitas APIP	Level 3
		6. Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK	6 Unit
		7. Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal B	4
		8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	A
3	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1 Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif
		2. Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik

### 2.2.2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program (IKU/IKP) di lingkup Eselon I dimaksudkan agar organisasi memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur, sehingga produktivitas kerja makin tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Deputi Bidang Persidangan menetapkan perjanjian kinerja sesuai dengan indikator yang telah disempurnakan yaitu terdiri atas tiga sasaran dan lima indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Deputi Persidangan harus selaras dengan indikator kinerja Sekjen DPR RI. Perjanjian Kinerja tersebut disampaikan pada Tabel 3

**Tabel 3**  
**Perjanjian Kinerja (Satker Setjen)**  
**Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
			2022
1	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR RI	A
		2. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif
2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan	3,24
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	A
		2. Nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B

**Gambar 2**  
**Penjabaran Kinerja Sekjen dan Deputi Bidang Persidangan**

Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi		2. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik
	2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan
	4. Hasil penilaian maturitas SPIP		2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan
	5. Hasil penilaian kapabilitas APIP		
	6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK		
	7. Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"		
	8. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR		
Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik		
	2. Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		

## 2.3. Metode Penghitungan Kinerja

### 2.3.1. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga

Indikator penilaian dilakukan dengan melihat kondisi, apakah penataan arsip telah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan laporan kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

**Tabel 4**  
**Rentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan**  
**Keterbukaan Informasi Publik**

No.	Kategori	Rentang Nilai
1.	Sangat Memuaskan (AA)	> 90 – 100
2.	Memuaskan (A)	> 80 – 90
3.	Sangat Baik (BB)	> 70 – 80
4.	Baik (B)	> 60 – 70
5.	Cukup (CC)	> 50 – 60
6.	Kurang (C)	> 30 – 50
7.	Sangat Kurang (D)	0 – 30

Sumber: Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.  
(Terdiri dari pengawasan eksternal dan pengawasan internal).

### 2.3.2. Hasil Penilaian terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik

Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun rentang nilai KIP terdiri dari lima kategori, dapat terlihat dalam tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5**  
**Rentang Nilai Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik**

No.	Kategori	Kategori
1.	Informatif	90 – 100
2.	Menuju Informatif	80 – 89
3.	Cukup Informatif	60 – 79
4.	Kurang Informatif	40 – 59
5.	Tidak Informatif	< 39

Sumber: Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan laporan kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

### 2.3.3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan

Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi bidang Persidangan pada tahun 2022 didapat melalui survei yang dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI. Survei ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun rentang nilai mutu pelayanan publik terlihat pada gambar 6 berikut ini:

**Gambar 3**  
**Rentang Nilai Mutu Pelayanan**

Nilai Interval Konversi (NIK)	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	1,00 - 2,5996	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	2,60 - 3,064	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	3,064 - 3,532	B	Baik
88,31 - 100,00	3,5324 - 4,000	A	Sangat Baik

### 2.3.4. Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang Persidangan

Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan hasil penghitungan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Adapun rentang nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Indeks Evaluasi Reformasi Birokrasi terlihat pada gambar 7 berikut ini:





### 2.3.5. Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Deputi Bidang Persidangan

Nilai evaluasi SAKIP Deputi Bidang Persidangan diperoleh melalui Hasil penghitungan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi. Tujuan evaluasi SAKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Adapun rentang nilai hasil evaluasi SAKIP berdasarkan Indeks Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terlihat pada gambar 8 berikut ini:

**Gambar 5**  
**Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III menggambarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. Capaian ini diukur dengan membandingkan antara target kinerja organisasi yang ingin dicapai dengan realisasi kinerja pada akhir tahun 2022. Berikut ini adalah tabel capaian kinerja.

**Tabel 6**  
**Capaian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1.	Hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR RI	A	BB	Tidak Tercapai
		2.	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif	Informatif	Tercapai
2	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan		Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan	3,24	3,31	Tercapai
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	A	AA	Tercapai
		2.	Nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B	Tercapai

Dari lima indikator kinerja yang diperjanjikan Deputi Bidang Persidangan, terdapat empat indikator kinerja yang mencapai target, yaitu hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik, indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan, indeks reformasi birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan, dan nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan. Adapun indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR RI.

Penjelasan dari capaian masing-masing indikator kinerja Deputi Bidang Persidangan adalah sebagai berikut:

### 3.1. Hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR RI

#### a. Target dan Realisasi

Sasaran Program		Indikator	
1.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas.	1.	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik
<b>Target</b>		A	Capaian
			Tidak
<b>Realisasi</b>		BB	Tercapai

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Kualitas Pengelolaan Arsip	<b>A</b> <b>81,00</b>	<b>BB</b> <b>77,99</b>	<b>96,28%</b>

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal sebesar 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal sebesar 40%. Pengawasan Kearsipan eksternal dilakukan oleh Tim Pengawasan Kearsipan ANRI dan untuk Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan yang dibentuk oleh Bagian Arsip sebagai Unit Kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan terhadap 20 Unit Pengolah setingkat Eselon II dan Inspektorat Utama di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai obyek pengawasan. Tahun 2022 Setjen DPR RI menargetkan nilai pengawasan kearsipan mendapatkan nilai 81,00 (A). Namun realisasinya hanya mendapatkan nilai 77,99 (BB). Hal ini dikarenakan Unit-unit pengolah belum melaksanakan regulasi dan kebijakan kearsipan dalam mengelola arsipnya sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan dan unit pengolah belum memiliki arsiparis atau pengelola arsip yang kompeten.

Berdasarkan Perka ANRI No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan, nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh dari Objek Pengawasan terdiri atas:

1. Nilai lebih dari 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan);
2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan);
3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik);
4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik);
5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup);
6. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang); dan
7. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (Sangat Kurang).

## b. Perbandingan Capaian Kinerja

**Tabel 7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2022**

Indikator Kinerja	Target, Realisasi & Nilai	Tahun		
		2020	2021	2022
Kualitas Pengelolaan Arsip	Target	B 60-70	BB 71-80	A 81-90
	Realisasi	A 85,00	BB 73,08	BB 77,99
	Capaian	121%	100%	96,28%

Tabel diatas adalah perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan DPR RI selama 3 (tiga) tahun terakhir. Dari tabel tersebut, dapat dilihat adanya penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, hal ini disebabkan karena indikator dan parameter yang digunakan oleh ANRI berbeda antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Perbedaan ini terjadi karena pada tahun 2020, parameternya adalah revisi atas regulasi 4 Pedoman Kearsipan yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip. Sedangkan untuk tahun 2021 unsur dan parameter yang digunakan adalah implementasi dari regulasi serta dilaksanakannya evaluasi tata kelola arsip internal K/L yang dapat dilihat dari adanya kegiatan pengawasan kearsipan internal. Di tahun 2022 nilai hasil pengawasan kearsipan DPR mengalami kenaikan meskipun belum mencapai target dan masih dalam kategori yang sama yaitu sangat baik (BB).

### c. Capaian dan Target Jangka Menengah

**Tabel 8**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d. 2022**

Indikator	Capaian Sampai dengan Tahun 2022	Target akhir Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
Kualitas Pengelolaan Arsip	BB 77,99	A 81-90	96,28%

Dari tabel indikator di atas dapat terlihat bahwa capaian indikator arsip tingkat kemajuan sampai tahun 2022 sebesar 96,28% dari target akhir di tahun 2024 yaitu A (81-90).

### d. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Standar Nasional

Perhitungan pengawasan kearsipan dilakukan oleh ANRI kepada seluruh K/L yang ada di Indonesia, sehingga nilai ini merupakan nilai dengan standar nasional. Sesuai Pengumuman Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: AK.01.02/25/2022 Tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menduduki peringkat ke 8 secara Nasional.

**III. LEMBAGA TINGGI NEGARA, LEMBAGA SETINGKAT KEMENTERIAN,  
LEMBAGA NON STRUKTURAL DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**

<b>NO</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Mahkamah Konstitusi	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Komisi Yudisial	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Badan Pemeriksa Keuangan	A (MEMUASKAN)
5	Dewan Perwakilan Daerah	A (MEMUASKAN)
6	Badan Pengawasan Pemilihan Umum	BB (SANGAT BAIK)
7	Ombudsman Republik Indonesia	BB (SANGAT BAIK)
8	Dewan Perwakilan Rakyat	BB (SANGAT BAIK)
9	Majelis Permusyawaratan Rakyat	BB (SANGAT BAIK)
10	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	BB (SANGAT BAIK)
11	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	BB (SANGAT BAIK)
12	Komisi Pemberantasan Korupsi	BB (SANGAT BAIK)
13	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	BB (SANGAT BAIK)
14	Tentara Nasional Indonesia	B (BAIK)
15	Sekretariat Kabinet	B (BAIK)
16	Kejaksaan Republik Indonesia	B (BAIK)
17	Komisi Pemilihan Umum	B (BAIK)
18	Kepolisian Republik Indonesia	B (BAIK)
19	Dewan Ketahanan Nasional	B (BAIK)
20	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	CC (CUKUP)
21	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	CC (CUKUP)
22	Mahkamah Agung	C (KURANG)

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



## e. Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Ketidakberhasilan

Tabel 9

Tabel Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Ketidakberhasilan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Upaya yg dilakukan
Kualitas Pengelolaan Arsip	A 81-90	BB 77,99	96,28%	Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kearsipan dinamis adalah masih kurangnya nilai pengawasan internal, dimana nilai ini mempengaruhi bobot penilaian dalam nilai hasil pengawasan kearsipan sebesar 40%.	Menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Pengawas Kearsipan Internal terhadap hasil pengawasan kearsipan adalah a. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada Unit-unit Pengolah untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamisnya. b. Melakukan pencaangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan DPR RI. c. Menambah jumlah arsiparis dan

					<p>pengelola arsip pada Unit Pengolah maupun Unit Kearsipan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p> <p>d. Melengkapi sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai dengan standar kearsipan</p> <p>e. Memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan program kearsipan.</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja**

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Bagian Arsip :

1. Sosialisasi regulasi kearsipan kepada seluruh unit pengolah di Setjen DPR RI;
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan kearsipan kepada unit pengolah di Setjen DPR RI;
3. Sosialisasi penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) kepada seluruh unit pengolah di Setjen DPR RI;
4. Melakukan *benchmarking* ke Sekretariat Negara dan Mahkamah Konstitusi yang telah mendapatkan nilai sangat memuaskan dalam pengawasan kearsipannya;
5. Melakukan kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) tentang Arsip Vital, Arsip Terjaga dan Arsip Elektronik;
6. Meningkatkan kualitas arsiparis dengan mengikuti Sertifikasi, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang diselenggarakan oleh ANRI;
7. Melakukan pemusnahan arsip Bagian Sekretariat Badan Anggaran dan Unit Pelayanan Kesehatan DPR RI; dan
8. Melakukan penyerahan arsip statis DPR RI ke Arsip Nasional Republik Indonesia.

### g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2022 ini anggaran yang disediakan untuk Kearsipan sebesar Rp. 4.339.968.000 dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp.4.127.818.497 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10**

**Tabel Realisasi Anggaran**

Tahun 2022		
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
4.339.968.000	4.127.818.497	95,11

Realisasi anggaran Tahun 2022 terdapat beberapa perubahan, banyak dilakukan revisi anggaran untuk mengoptimalkan segala jenis kegiatan Bagian Arsip seperti kegiatan *workshop* dan pembentukan Tim. Meskipun serapan anggaran Bagian Arsip Tahun 2022 mengalami penurunan atau belum optimal sebesar 95,11% disebabkan Belanja Honor Output Kegiatan terkendala karena adanya kegiatan yang bersamaan pada akhir tahun.

## 3.2. Hasil Penilaian terhadap Implementasi Standar Teknis Layanan Informasi Publik

### 3.2.1. Target dan Realisasi

Sasaran Program		Indikator	
1.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas.	2.	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik
<b>Target</b>		Informatif	Capaian
			100%
<b>Realisasi</b>		Informatif	

Penilaian terhadap implementasi keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui kegiatan Evaluasi dan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menilai apakah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen DPR RI yang bertanggung jawab atas implementasi keterbukaan informasi publik di badan publik Setjen DPR RI telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian tersebut meliputi aspek layanan informasi publik, tata kelola informasi publik, dan pendokumentasian informasi publik. Secara teknis, penilaian dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Dalam Bab 8 Peraturan tersebut disebutkan, hasil akhir dari Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik berupa kualifikasi sebagaimana berikut:

- a. informatif dengan nilai 97-100;
- b. menuju Informatif dengan nilai 80-96;
- c. cukup Informatif dengan nilai 60-79;
- d. kurang Informatif dengan nilai 40-59; dan
- e. tidak Informatif dengan nilai <39.

Untuk pelaksanaan pengukuran capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, kualifikasi tersebut dikuantitatifkan menjadi angka sebagai berikut :

**Tabel 11**

**Kualifikasi Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI**

No	Kualifikasi	Dalam angka untuk pengukuran capaian kinerja
1	Informatif	5
2	Menuju informatif	4
3	Cukup Informatif	3
4	Kurang Informatif	2
5	Tidak Informatif	1

Pada tahun 2022, sesuai Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 09/KEP/KIP/XII/2022 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022, Badan Publik Setjen DPR RI berhasil mendapatkan predikat sebagai Badan Publik Informatif dengan perolehan nilai **98,13** dan DPR berada di urutan keenam dalam kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian.

**Tabel 12**  
**Detail Penilaian Monitoring dan Evaluasi**  
**Keterbukaan Informasi Publik 2022**

No.	Aspek Penilaian	Nilai Monev 2022	Nilai Maksimal
1.	Sarana Prasarana	10	10
2.	Kualitas Informasi	10	10
3.	Jenis Informasi	40	40
4.	Komitmen Organisasi	10	10
5.	Digitalisasi	20	20
6.	Barang dan Jasa	9,8	10
7.	Presentasi	13,3	15
<b>TOTAL</b>		<b>98,13</b>	<b>100</b>

Dengan target kinerja pada tahun 2022 adalah “Informatif” (5), dan realisasi adalah “Informatif” (5), maka perhitungan capaian kinerja Indikator Hasil penilaian terhadap implementasi keterbukaan informasi publik adalah 100%.

**Gambar 6**  
**Penganugerahan PPID DPR RI sebagai Badan Publik Informatif**



### 3.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja

Terdapat tren peningkatan capaian kinerja atas hasil penilaian implementasi standar teknis layanan informasi publik. Tren kenaikan tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini:

**Tabel 14**  
**Perbandingan Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik**

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target, Realisasi & Nilai	Tahun		
					2020	2021	2022
1	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	2.	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Target	Menuju Informatif	Informatif	Informatif
				Realisasi	Menuju Informatif	Informatif	Informatif
				Nilai	79,48	96,52	98,13

Meskipun capaian tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sama-sama informatif, jika diperhatikan lebih seksama terdapat peningkatan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat antara tahun 2021 dan tahun 2022. Terdapat **kenaikan 1,61** poin dari 96,52 pada tahun 2021 menjadi 98,13 pada tahun 2022. Kenaikan ini karena adanya upaya PPID Setjen DPR RI untuk terus memperbaiki baik dalam aspek layanan permohonan informasi publik, pengelolaan informasi publik dan pendokumentasian informasi publik. Dari hulu hingga hilir keterbukaan informasi publik diperbaiki untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

Beberapa aspek penting yang dilakukan perbaikan oleh PPID Setjen DPR RI adalah penguatan kompetensi SDM pelayanan, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Ketiga aspek di atas dilaksanakan dengan pengawasan kualitas



kerja yang ketat, sehingga output kerja dapat secara nyata dirasakan oleh pengguna layanan.

### 3.2.3 Capaian dan Target Jangka Menengah

Pada tahun 2022 PPID Setjen DPR RI yang mengelola keterbukaan informasi publik pada Badan publik DPR RI masuk dalam kualifikasi badan publik informatif. Merujuk pada Renstra Sekjen, capaian target indikator kinerja hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik untuk jangka menengah di tahun 2022 ini masih *on the track* menuju target akhir pada tahun 2024, yakni DPR RI sebagai badan publik informatif.

**Tabel 15**

#### Capaian Target Kinerja Jangka Menengah

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian & Target	Tahun	
			2022	2024
1 Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	2 Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Target	Informatif	Informatif
		Capaian	Informatif	

Dari target yang telah direncanakan dalam rangka upaya perbaikan kualitas keterbukaan informasi publik perlu adanya peningkatan indeks keterbukaan informasi publik ditahun tahun yang akan datang. Kenaikan indeks keterbukaan informasi publik adalah cerminan dari peningkatan kepatuhan badan publik DPR RI untuk mengimplementasikan berbagai peraturan terkait keterbukaan informasi publik.

### 3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Berdasar Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 09/KEP/KIP/XII/2022 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2022, Komisi Informasi Pusat mengelompokkan badan publik yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam beberapa kategori. Badan publik DPR RI masuk dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Pada kategori tersebut terdapat 17 lembaga yang masuk dalam kategori informatif dengan rerata nilai 95,70. DPR RI berada pada urutan ke enam dari 17 lembaga tersebut dengan indeks nilai keterbukaan informasi publik sebesar 98,13. Jika rerata nilai pada kategori ini dilihat sebagai standar nasional badan publik informatif untuk kategori lembaga negara dan lembaga negara non kementerian maka nilai yang diperoleh berada di atas rata-rata nasional.

**Tabel 16**

#### Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target, Realisasi & Nilai	Tahun		
			2020	2021	2022
1. Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	2. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Target	Menuju Informatif	Informatif	Informatif
		Realisasi	Menuju Informatif	Informatif	Informatif
		Nilai	79,48	96,52	98,13

### 3.2.5 Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan

Tabel 17

Tabel Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	2.	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif	Informatif 98,13	100%	Peningkatan layanan informasi Publik	Peningkatan kualitas SDM layanan
							Peningkatan tata Kelola Informasi Publik	Kolaborasi dengan berbagai <i>stakeholder</i> terkait peningkatan tata Kelola
							Peningkatan Penyediaan informasi Publik	Mendorong penyediaan informasi publik di DPR RI

Keberhasilan PPID dalam mencapai target kinerja menjadikan DPR RI sebagai badan publik informatif dipengaruhi oleh berbagai upaya perbaikan baik pada aspek layanan, tata kelola, maupun penyediaan informasi publik.

1. Aspek Layanan. PPID menitik beratkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia layanan informasi publik. Dengan peningkatan kapasitas proses layanan baik pada tahap registrasi permohonan, analisis permohonan, penelusuran informasi maupun penyampaian informasi dapat meningkat baik dari sisi kecepatan maupun kesesuaian antara informasi yang diminta dengan yang diberikan kepada pemohon informasi publik. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan informasi publik, melalui kegiatan *benchmarking*, bimbingan teknis, seminar, workshop maupun *coaching clinic*.
2. Kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* terkait peningkatan tata Kelola. Tata Kelola informasi baik yang berada pada unit layanan di PPID utama

maupun PPID Pelaksana di masing-masing unit kerja perlu dikelola dengan baik. Upaya perbaikan tata Kelola dengan penyempurnaan berbagai SOP terkait tata Kelola informasi publik. SOP yang ada dilakukan pengawasan untuk dapat dilaksanakan agar kegiatan tata kelola informasi dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Mendorong penyediaan informasi publik di DPR RI. Berdasar evaluasi layanan informasi dua tahun terakhir didapatkan fakta bahwa banyak pemohon informasi yang meminta informasi yang sebenarnya telah tersedia di website [dpr.go.id](http://dpr.go.id). Berangkat dari fakta tersebut PPID melakukan upaya edukasi kepada pemohon atas akses informasi di website [dpr.go.id](http://dpr.go.id). Sejalan dengan upaya edukasi tersebut PPID mendorong berbagai unit kerja yang menyediakan informasi publik untuk menyediakan informasi publik yang banyak diakses oleh publik. Upaya tersebut terbukti berhasil, bahwa pada tahun 2022 terdapat peningkatan jumlah informasi publik yang diunggah di website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dan dibarengi dengan penurunan jumlah permohonan informasi publik. Penurunan jumlah tersebut disebabkan para pemohon informasi dapat mengakses informasi publik langsung melalui website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) tanpa harus mengajukan permohonan.

### **3.2.6 Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja**

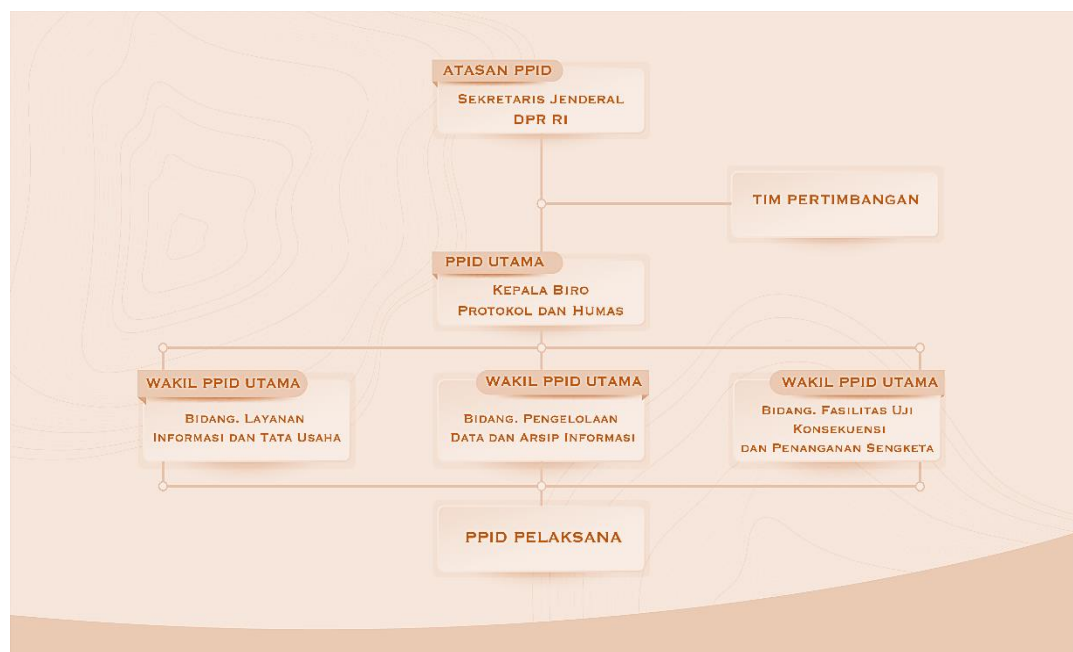
Deputi Bidang Persidangan terus mendorong peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Setjen DPR RI. Peningkatan capaian indeks keterbukaan informasi publik pada tahun 2022 karena adanya upaya inovasi peningkatan pelayanan PRIMA (Profesional, Ramah, Integritas, dan Amanah). Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja layanan keterbukaan informasi publik di DPR RI adalah sebagai berikut:

### a. Restrukturisasi organisasi

Perubahan struktur PPID pada tahun 2022 dilaksanakan karena adanya perubahan struktur organisasi Setjen DPR RI dan perubahan Peraturan Komisi Informasi Pusat terkait Standar Layanan Informasi Publik. Berikut struktur PPID berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2257 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Setjen DPR RI, dimana strukturnya terdiri dari Atasan PPID PPID Utama, Wakil PPID dan PPID pelaksana, serta penguatan dengan adanya Tim Pengarah yang terdiri dari Pejabat eselon 1 dilingkungan Setjen DPR RI. Berikut gambar struktur PPID Setjen DPR RI.

**Gambar 7**

### **Struktur Organisasi PPID Setjen DPR RI**



### **b. Optimalisasi layanan informasi publik**

Sepanjang tahun 2022 terdapat tujuh ratus empat puluh satu (741) permohonan informasi publik. Dari jumlah tersebut informasi yang diminta sebagian besar terkait dokumen pembahasan rancangan undang-undang. Jika dilihat dari sarana permohonan yang digunakan, sembilan puluh delapan persen (98%) atau setara tujuh ratus tiga puluh (730) permohonan diajukan melalui website portal permohonan [www.ppid.dpr.go.id](http://www.ppid.dpr.go.id).

Banyaknya jumlah permohonan yang disampaikan melalui website menjadi dasar untuk dilakukan pengembangan website untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam mengakses informasi publik, khususnya untuk para penyandang disabilitas. Pada tahun 2022 dilakukan pengembangan *website* PPID ([ppid.dpr.go.id](http://ppid.dpr.go.id)) yang ramah disabilitas sensorik netra, dengan menyematkan fitur untuk memudahkan para penyandang disabilitas sensorik netra, baik dalam mengakses informasi maupun mengajukan permohonan informasi publik melalui *website*. Bagi pemohon yang datang langsung disediakan fasilitas sarana prasarana fisik bagi penyandang disabilitas tunadaksa. Untuk meningkatkan inklusivitas akses informasi publik di DPR RI, Rapat Paripurna DPR RI telah menggunakan juru bahasa isyarat untuk menjangkau penyandang disabilitas tuna rungu.

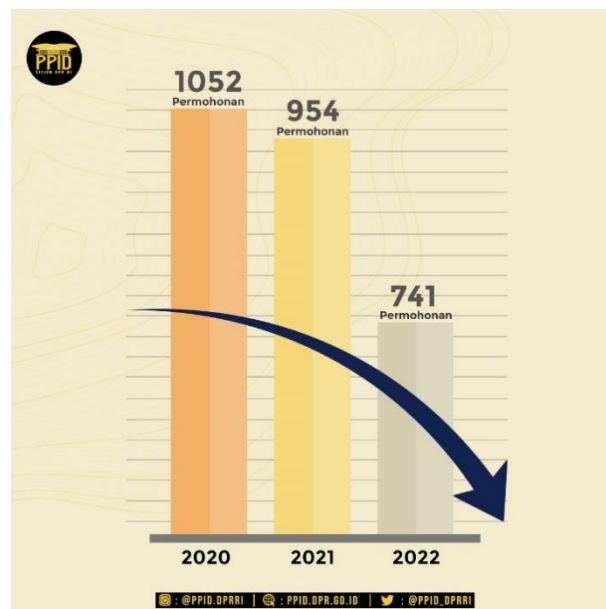
### **c. Edukasi cara akses informasi pada website [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)**

Tahun 2022 PPID Setjen DPR RI juga mencanangkan program “Menuju Zero Permohonan Informasi Publik”. Program ini berangkat dari data bahwa banyak pemohon informasi mengajukan permohonan informasi yang telah ada di *website* resmi DPR RI. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan publik mengenai tata cara pemanfaatan *website* dalam pemenuhan atas informasi yang dibutuhkan. Berangkat dari hal di atas, PPID Setjen DPR RI melakukan upaya edukasi kepada pemohon dan mensosialisasikan tata cara akses informasi kepada pemohon informasi, sehingga ke depannya dapat mengakses langsung informasi-informasi yang telah disediakan pada *website* resmi DPR

RI tanpa harus mengajukan permohonan informasi. Program ini berhasil dengan indikasi bahwa terdapat penurunan permohonan informasi publik di tahun 2022, jika dibanding permohonan informasi tahun-tahun sebelumnya.

**Gambar 8**

**Trend Permohonan Informasi Publik Turun**



**d. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**

Guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik, PPID Setjen DPR RI melakukan survei kepuasan masyarakat atas layanan informasi publik. Survei dilaksanakan terhadap delapan unsur layanan sebagaimana ketentuan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan PPID Setjen DPR RI bernilai **Baik** dengan total skor sebesar **82,75** dari 8 unsur pelayanan. Adapun hasil untuk masing-masing unsur layanan dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 18**



### Hasil SKM Berdasar Unsur Layanan

No	Pertanyaan (Unsur Pelayanan)	Nilai SKM	Mutu
1.	Pertanyaan 1 (Kemudahan Mekanisme, Sistem, dan Prosedur)	3,32	B
2.	Pertanyaan 2 (Kemudahan Persyaratan)	3,34	B
3.	Pertanyaan 3 (Waktu Penyelesaian)	3,34	B
4.	Pertanyaan 4 (Kesesuaian Produk yang Diberikan)	3,22	B
5.	Pertanyaan 5 (Kompetensi Petugas)	3,26	B
6.	Pertanyaan 6 (Perilaku Petugas)	3,47	B
7.	Pertanyaan 7 (Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan)	3,15	B
8.	Pertanyaan 8 (Sarana dan Prasarana/Tampilan Website)	3,38	B
	Total Perhitungan (Nilai Survei x Nilai Dasar)	<b>3,31</b> <b>82,75</b>	<b>B</b> <b>BAIK</b>

#### 3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2022 ini anggaran yang disediakan untuk pengelolaan layanan Informasi Publik sebesar Rp.1.304.385.000 dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp.1.251.357.000.

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Penilaian Layanan Informasi Publik	1.304.385.000	1.251.357.000	95,93%

### Analisis Atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Penilaian Layanan Informasi Publik	Informatif	Informatif 98,13	100%	1.304.385.000	1.251.357.000	95,93%

Anggaran yang telah direncanakan terealisasi sesuai rencana. Anggaran yang terealisasi digunakan untuk melakukan dan menunjang kegiatan layanan informasi publik di DPR RI, baik terkait layanan, pengelolaan, pengembangan aplikasi, pengembangan SDM, dan dokumentasi. Adapun 4,1% anggaran yang tidak terserap, antara lain biaya denda badan publik karena tidak ada denda sengketa pada tahun 2022, honorarium tim kerja karena adanya kebijakan efisiensi atau pembatasan jumlah tim di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga banyak anggota tim yang terkena matriks. Namun demikian, tugas dan kinerja anggota tim dapat terlaksana dengan baik.

Terkait capaian kinerja keterbukaan informasi publik yang mencapai 100% dan realisasi anggaran yang hanya membutuhkan anggaran 95,93% ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 4,1% dari total anggaran yang telah direncanakan.

### 3.3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan

#### a. Target dan Realisasi

Sasaran Program		Indikator	
2.	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan.	1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan
	Target:	3,24	<b>Capaian</b>
	Realisasi	<b>3,31</b>	<b>Tercapai 102,2%</b>

Pelaksanaan survei mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kegiatan survei ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2023.

Survei melibatkan 231 Anggota DPR RI yang terdiri atas sembilan fraksi (Tabel 21). Jumlah tersebut masih dalam batas *margin error*, sebesar 5% dan *confidence level* 95% sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang gejala yang ingin diketahui. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner *self-report*.

Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan, diberikan kepada responden untuk mendapatkan jawaban (*self-report*). Melalui *self-report*, partisipan diminta untuk memberikan respons yang sesuai dengan pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis. Pada tahun 2022, survei dilakukan dengan menggunakan media digital, yaitu *Google Form* dan isian manual karena adanya pandemi Covid-19.

**Tabel 19**  
**Fraksi-Fraksi di DPR RI**

No	Fraksi	Jumlah Anggota	Sampel
1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	128	51
2	Fraksi Partai Golkar	85	34
3	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	78	31
4	Fraksi Partai Nasdem	59	24
5	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	58	23
6	Fraksi Partai Demokrat	54	22
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	50	20
8	Fraksi Partai Amanat Nasional	44	18
9	Partai Partai Persatuan Pembangunan	19	8
	Jumlah	575	231

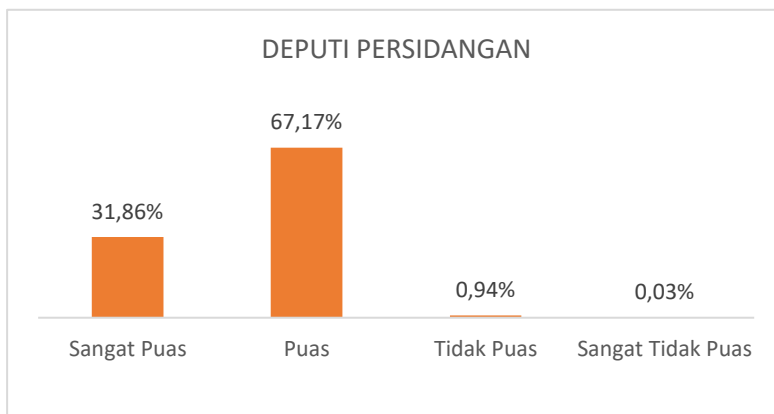
Secara umum terdapat empat unsur pelayanan yang terbagi ke dalam tujuh belas pertanyaan. Dibanding survei tahun 2021, terdapat pertanyaan baru terkait dengan kemudahan memperoleh informasi tentang mekanisme dan prosedur layanan Setjen DPR RI.

Unsur-unsur penilaian tersebut mewakili enam unit kerja setingkat Eselon II yang berada di bawah koordinasi Deputi Persidangan, yaitu Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro Kerja Sama Antar-Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, serta Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Dari tujuh belas unsur penilaian layanan Deputi Persidangan yang ditanyakan kepada responden, rata-rata menyatakan sangat puas, yaitu sebanyak 31,86 persen dan menyatakan puas sebanyak 67,17 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 0,94 persen dan hanya 0,03 persen responden yang menyatakan sangat tidak puas. Hasil survei mengenai layanan Deputi Persidangan memperoleh nilai indeks 3,31 atau 82,72 untuk nilai interval konversinya dan masuk kategori “Baik”.

Grafik 4

## Indeks Kepuasan Deputi Persidangan



Tabel 20

## Indeks Kepuasan Deputi Persidangan

	Skor	F	%	Urutan	Nilai
Sangat Puas	4	1251	31,86%	2	5004
Puas	3	2637	67,17%	1	7911
Tidak Puas	2	37	0,94%	3	74
Sangat Tidak Puas	1	1	0,03%	4	1
<b>Jumlah</b>		<b>3926</b>	<b>100,00%</b>		<b>12990</b>
				NI	<b>3,31</b>
				NIK	<b>82,72</b>

Berdasarkan hasil survei tahun 2022, tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan sebesar 3,31 atau masuk kategori “Baik”. Nilai tersebut di atas target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja dan mengalami kenaikan dibandingkan hasil sebelumnya.

**Tabel 21**  
**Realisasi Indeks Kepuasan Anggota DPR RI**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	<b>3,24</b>	<b>3,31</b>

**Tabel 22**  
**Persandingan Hasil Survei**

Pertanyaan		Indeks	
		2021	2022
A.	<b>Waktu Penyelesaian</b> Kecepatan dalam memberikan:	<b>3,26</b>	<b>3,31</b>
	1. Layanan Persidangan	3,33	3,31
	2. Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,24	3,27
	3. Layanan Pemberitaan Parlemen	3,24	3,30
	4. Layanan Keprotokolan	3,24	3,38
	5. Layanan Perpustakaan	3,16	3,27
B.	<b>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</b> Kualitas dan ketepatan dalam memberikan:	<b>3,25</b>	<b>3,28</b>
	6. Layanan Persidangan	3,30	3,30
	7. Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen	3,24	3,25
	8. Layanan Pemberitaan Parlemen	3,21	3,27
	9. Layanan Keprotokolan	3,33	3,35
	10. Layanan Perpustakaan	3,20	3,26
C.	<b>Kompetensi dan Perilaku SDM</b>	<b>3,26</b>	<b>3,31</b>
	11. Profesionalisme SDM Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan kepada Anggota DPR RI.	3,28	3,33

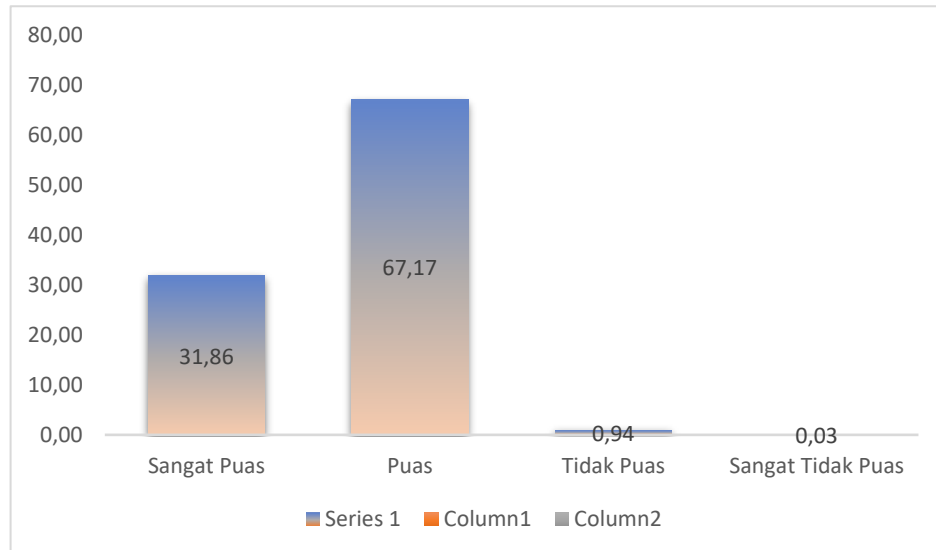
	12.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama SDM Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan kepada Anggota DPR RI.	3,23	3,27
	13.	Disiplin kerja SDM Setjen DPR RI (mengikuti peraturan, tepat waktu, dan kesediaan bekerja di luar jam kerja).	3,21	3,29
	14.	Keramahan dan kesopanan SDM Setjen DPR RI dalam memberikan dukungan kepada Anggota DPR RI.	3,30	3,36
<b>D.</b>	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>		<b>3,32</b>	<b>3,35</b>
	15.	Dukungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan sistem, mekanisme, dan prosedur kerja	3,33	3,39
	16.	Kemudahan mendapatkan layanan yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI	3,31	3,35
	17.	Kemudahan memperoleh informasi tentang mekanisme dan prosedur layanan Setjen DPR RI		3,33
			<b>3,27</b>	<b>3,31</b>

Berdasarkan Tabel 22. dapat dilihat bahwa unsur yang diusulkan paling banyak untuk peningkatan adalah pada kecepatan layanan Waktu Penyelesaian dan layanan Kompetensi dan Perilaku SDM. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya kualitas SDM di jajaran Deputy Bidang Persidangan dan inovasi penggunaan teknologi informasi yang sudah bertahap digunakan dalam memberikan layanan Dewan, sehingga kecepatan layanan dan kecepatan dalam merespons berbagai hal yang dibutuhkan Anggota Dewan dalam melaksanakan tugasnya diparlemen dapat terpenuhi.



Grafik 5

## Indeks Komposit Deputi Bidang Persidangan



Apabila dibandingkan dengan indeks komposit tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Setjen DPR RI maupun Eselon I lainnya, maka tingkat kepuasan terhadap Deputi Bidang Persidangan menempati posisi tertinggi kedua (tabel 26). Kondisi tersebut berbeda dibandingkan tahun 2021, di mana tingkat kepuasan Deputi Bidang Persidangan di urutan pertama.

Tabel 23

## Rekapitulasi Hasil Survei per Eselon I

No	Unit Kerja	2021	2022
1	Deputi Bidang Administrasi	3,23	3,33
2	Deputi Bidang Persidangan	3,27	3,31
3	Badan Keahlian	3,25	3,29
4	Pusat Teknologi Informasi	3,23	3,31
Indeks Komposit Setjen DPR RI		<b>3,24</b>	<b>3,31</b>

Untuk target jangka menengah, Deputi Bidang Persidangan menargetkan indeks kepuasan sebesar 3,28, maka indeks kepuasan atas layanan target jangka menengah sesuai yang tercantum di Renstra sudah dicapai bahkan sudah melebihi target.

## b. Pencapaian Perbandingan Kinerja

**Tabel 24**

### **Persandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan Tahun 2020-2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indeks kepuasan anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan	3,20	3,20	100%	3,22	3,27	101,6%	3,24	3,31	102,2%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi dan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 24 bahwa realisasi indikator kinerja ini selalu meningkat tiap tahunnya, begitu juga dengan tingkat capaiannya. Tahun ini realisasi indikator ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

## c. Capaian dan Target Jangka Menengah

**Tabel 25**

### **Persandingan Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang Persidangan Tahunan 2022 dan 2024**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Target 2024	Tingkat Kemajuan
Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3.31	3.28	100,92 %

Dari tabel di atas capaian indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan ” pada tahun 2022 sebesar 3,31. Realisasi indikator kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis (Renstra) 2024 yang sebesar 3,28, maka pada Tahun 2022 ini telah tercapai dari target yang ditetapkan.

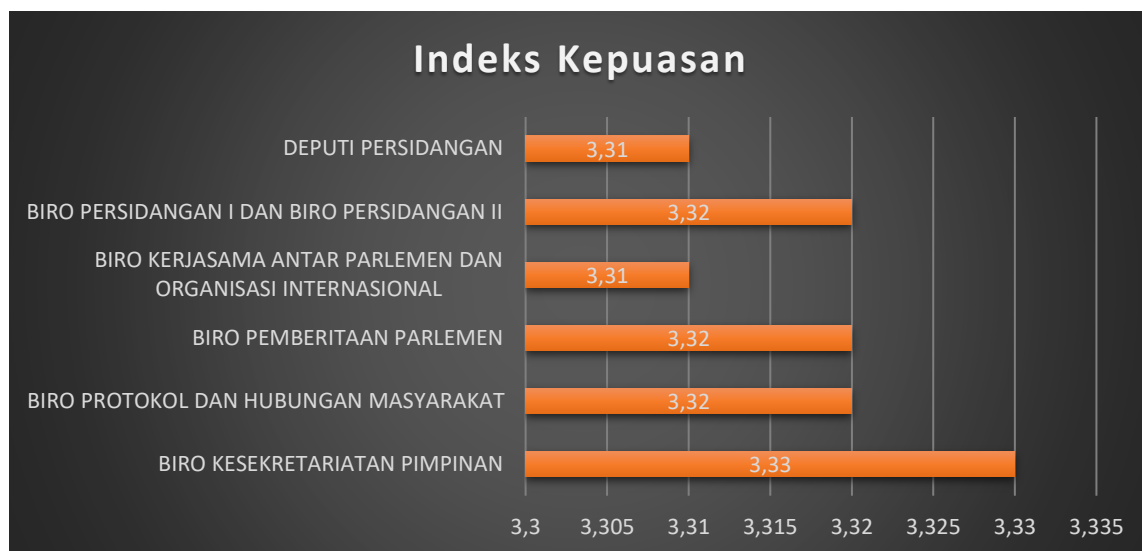
Dalam survei yang dilakukan terhadap Deputi Bidang Persidangan, terdapat beberapa unsur penilaian antara lain:

1. sistem, mekanisme dan prosedur;
2. waktu penyelesaian;
3. produk spesifikasi jenis pelayanan;
4. kompetensi dan perilaku SDM;
5. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
6. sarana dan prasarana.

Unsur penilaian tersebut diajukan kepada responden untuk menilai tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan. Unsur-unsur tersebut diwakili oleh enam unit kerja setingkat Eselon II yang berada di bawah Deputi Bidang Persidangan, yaitu Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro KSAP, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Protokol dan Humas, dan Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Peningkatan ini terjadi pada kecepatan layanan Waktu Penyelesaian dan layanan Kompetensi dan Perilaku SDM. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya kualitas SDM di jajaran Deputi Persidangan dan inovasi penggunaan teknologi informasi yang sudah bertahap digunakan dalam memberikan layanan Dewan, sehingga kecepatan layanan dan kecepatan dalam merespons berbagai hal yang dibutuhkan Anggota Dewan dalam melaksanakan tugasnya diparlemen dapat terpenuhi.

**Grafik 6**  
**Hasil Survei dan Indeks Kepuasan**



**d. Perbandingan Hasil Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Karakteristik bidang persidangan hanya ada di Sekretariat Jenderal DPR RI, oleh karena itu tidak ada standar atau acuan secara nasional.

### e. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi

Tabel 26

Analisis Penyebab Keberhasilan serta Alternatif Solusi

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisa Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan	3.24	3.31	102,2%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kompetensi SDM pegawai di lingkungan Deputi Bidang Persidangan</li> <li>koordinasi yang intensif khususnya antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Deputi Bidang Persidangan dalam memberikan dukungan yang maksimal kepada Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI, baik dalam segi dukungan operasional maupun substansi serta layanan persidangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kesempatan kepada tiap-tiap pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan dukungan yang maksimal kepada Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI.</li> <li>Meningkatkan koordinasi yang intensif antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Deputi Bidang Persidangan</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menindaklanjuti setiap permintaan dan penugasan dari Pimpinan DPR RI.</li> </ol>

## f. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 27

### Perbandingan pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Terwujudnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan persidangan Deputi Bidang Persidangan	3,24	3,31	102,2%	146.573.849.000	144.573.849.000	98,82%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Terwujudnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan” dengan indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan” telah diselenggarakan secara efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 102,2%, dengan implementasi anggaran mencapai 98,82%.

## g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Deputi Bidang Persidangan selama tahun 2022 dalam hal menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Deputi Bidang Persidangan antara lain:

1. Memberikan kesempatan kepada tiap-tiap pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan dukungan yang maksimal kepada Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI.
2. Meningkatkan koordinasi yang intensif antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Deputi Bidang Persidangan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menindaklanjuti setiap permintaan dan penugasan dari Pimpinan DPR RI.

Biro KSAP yang merupakan unit Eselon II di bawah Deputi Bidang Persidangan memiliki tugas menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerjasama antar parlemen dan layanan alih bahasa. Sebagai *supporting system* BKSAP, Biro KSAP menjalankan tugasnya sebagai sekretariat yang mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain, menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR RI, maupun menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang/konferensi yang bersifat regional maupun internasional.

Pada tahun 2022, Deputi Bidang Persidangan telah memberikan dukungan terhadap berlangsungnya dua konferensi Internasional di Indonesia, di mana DPR RI menjadi tuan rumah, yaitu:

**1. Penyelenggaraan Sidang *the 144<sup>th</sup> Inter-Parliamentary Union Assembly and other related meetings* pada tanggal 20-24 Maret 2022, di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali**

Sidang *the 144<sup>th</sup> Inter-Parliamentary Union Assembly* dilaksanakan pada tanggal 20-24 Maret 2022 bertempat di Bali. *IPU Assembly* merupakan sidang Internasional yang dilakukan dua kali dalam setahun. Pada IPU ke-143, bulan Oktober 2021, di Madrid, Spanyol, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan kesediaan dan kesiapan DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang IPU ke-144.

Sidang *the 144<sup>th</sup> IPU Assembly* dihadiri lebih dari 100 negara dengan peserta lebih dari 1.000 orang, terdiri dari ketua Parlemen, wakil ketua Parlemen, anggota Parlemen, observer, media, maupun sekretaris jenderal Parlemen dan sekretariat pendukung lainnya. Sidang tersebut membahas tema utama, yaitu: *Getting to zero: Mobilizing parliaments*



*to act on climate change*. Hasil dari sidang tersebut dihasilkan *output* kegiatan berupa 2 draf resolusi dan 1 deklarasi, yaitu:

- a. peaceful resolution of the war in Ukraine, respecting international law, the charter of the United Nations and territorial integrity;
- b. leveraging Information and Communication Technology as an enabler for the education sector, including in times of pandemic;
- c. general debate: Getting to zero: mobilizing parliaments to act on climate change

Keberhasilan penyelenggaraan Sidang *the 144<sup>th</sup> Inter-Parliamentary Union Assembly* merupakan satu prestasi bagi DPR RI karena penyelenggaraan ini merupakan kegiatan berskala internasional pertama yang dilaksanakan di Indonesia sejak Pandemi Covid-19. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan jajaran Deputi Persidangan dalam memberikan dukungan teknis dan Substansi bagi penyelenggaraan Sidang *the 144<sup>th</sup> Inter-Parliamentary Union Assembly*.

## **2. Penyelenggaraan Sidang *the G20 Parliamentary Speakers Summit (P20)* pada tanggal 5-7 Oktober 2022 di Gedung DPR RI, Jakarta**

Disamping penyelenggaraan Sidang *the 144<sup>th</sup> Inter-Parliamentary Union Assembly*, DPR RI juga menyelenggarakan Sidang *the G20 Parliamentary Speakers Summit (P20)* yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 Oktober 2022 bertempat di Gedung DPR RI, Jakarta. Penyelenggaraan Sidang *Speaker Summit P20* merupakan penyelenggaraan event skala internasional kedua bagi DPR RI. Dalam Sidang ini, juga dihadiri oleh lebih dari Anggota G-20, Negara Observer dan juga media internasional. Keberhasilan penyelenggaraan Sidang *Speaker Summit P20* juga tidak terlepas dari dukungan Jajaran Deputi Persidangan dalam memberikan dukungan teknis dan substansi bagi penyelenggaraan sidang *Speaker Summit P20* tersebut.

### 3.4. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan

#### a. Target dan Realisasi

Sasaran Program		Indikator	
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan
<b>Target</b>		A (40,01)	Capaian
<b>Realisasi</b>		AA (46,43)	<b>Tercapai</b> <b>116,05%</b>

Penilaian atas Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal, seperti Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Tahun 2022 telah dilakukan penilaian atau evaluasi internal atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022 oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), dalam hal ini adalah Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui informasi tentang sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI serta memberikan saran dan perbaikan dalam penyusunan rencana aksi perbaikan yang berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi di tahun berikutnya.

Berdasarkan surat dari Inspektur II Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 092/PI.03/I/2023, tanggal 13 Januari 2023, mengenai Hasil Evaluasi Internal atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI memperoleh nilai **46,43** atau sebesar **92,86%**, dengan kategori **“AA” (Istimewa)**. Adapun target Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Persidangan pada Tahun 2022 adalah katagori **“A”** sehingga capaian

untuk Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Persidangan adalah “Tercapai” dengan melebihi target yaitu 116,05%.

Jika dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Persidangan pada tahun 2021, yaitu dengan nilai skor **32,01 (77,19%)** dengan kategori “BB” maka nilai Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Persidangan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 20,30%.

**Tabel 28**

**Rincian Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022**

No	Penilaian	Nilai Maksimal LKE	Nilai LKE	Bobot	Nilai Akhir
A	B	C	D	E	F = (D / C) x E
I.	<b>Pemenuhan</b>	<b>14,60</b>	<b>13,71</b>	<b>20</b>	<b>18,78</b>
II	<b>Reform</b>	<b>21,70</b>	<b>20,00</b>	<b>30</b>	<b>27,65</b>
Nilai Hasil Akhir Deputy Bidang Persidangan		<b>36,30</b> <b>(100%)</b>	<b>33,71</b> <b>(92,86%)</b>	<b>50,00</b> <b>(100%)</b>	<b>46,43</b> <b>(92,86%)</b>
Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi		<b>AA</b>			

#### b. Pencapaian Perbandingan Kinerja

**Tabel 29**

**Persandingan Indeks Reformasi Birokrasi**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	
<b>03</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputy Bidang Persidangan	<b>BB</b> <b>(76,63)</b>	<b>BB</b> <b>(77,19)</b>	<b>AA</b> <b>(92,86)</b>

Tabel 30

**Persandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Persidangan Tahun 2020-2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang Persidangan	BB	BB	100%	BB	BB	100%	A (40,01)	AA (46,43)	116,05%

Berdasarkan tabel diatas, bahwa indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 diketahui bahwa capaian realisasi mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan Deputi Bidang Persidangan telah memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.

**c. Capaian dan Target Jangka Menengah**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Renstra	2022
<b>03</b> Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	<b>A</b>	<b>AA</b>

**Tabel 31**  
**Persandingan Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi**  
**Bidang Persidangan Tahunan 2022 dan 2024**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Target 2024	Tingkat Kemajuan
Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang Persidangan	AA	AA	100 %

Dari tabel di atas capaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang Persidangan dengan tahun 2024 telah mencapai predikat AA, hal ini sejalan dengan target akhir di tahun 2024 sebesar 100%, sehingga Deputi Bidang Persidangan perlu meningkatkan kinerja yang sudah dilaksanakan dengan menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi peningkatan pencapaian reformasi birokrasi di tahun berikutnya.

**d. Perbandingan Hasil Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

**Tabel 32**  
**Persandingan Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang**  
**Persidangan Tahun 2022 Dan Standar Nasional**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang Persidangan	46,43	75,65	61,37%

Pada tahun 2021, tercatat bahwa nilai rata-rata nilai RB pada Kementerian/Lembaga meningkat menjadi 75,65 dari sebelumnya 74,39. Rata-rata standar nasional sesungguhnya belum bisa dicapai dari hasil

perolehan nilai RB Setjen DPR RI yaitu 77,19 (predikat BB). Maka dengan perolehan nilai RB Deputy Bidang Persidangan yang sangat baik pada tahun 2022, diharapkan dapat mendorong hasil penilaian RB Setjen DPR RI pada tahun mendatang.

#### e. Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Ketidakberhasilan

**Tabel 33**  
**Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisa Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputy Bidang Persidangan	A	AA	116,05%	Faktor penyebab keberhasilan adalah: Pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Deputy Bidang Persidangan telah mulai berjalan dengan baik	Melaksanakan /menindak lanjuti hasil evaluasi internal dalam hal ini adalah APIP Sekretariat Jenderal DPRRI

Faktor keberhasilan pencapaian indek RB pada tahun 2022 adalah pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI telah mulai berjalan dengan baik, namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut.

#### f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Deputy Bidang Persidangan selama tahun 2022 dalam hal menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja indeks RB antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Nilai Organisasi “BerAKHLAK” dilingkungan Deputy Bidang Persidangan dengan membuat surat Edaran Deputy

Bidang Persidangan Nomor 16/SE-DP/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Implementasi *Core Value* dan *Employ Branding* ASN di lingkungan Deputi Bidang Persidangan

2. Telah dilakukan identifikasi dan analisis kebijakan di lingkungan Deputi Bidang Persidangan
3. Telah dilakukan identifikasi kebutuhan SOP di lingkaran deputi Bidang Persidangan berdasarkan dokumen peta proses bisnis serta penyesuaian dan revisi atas DOP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan
4. Melakukan penguatan terkait keterlibatan pimpinan yaitu dengan menyusun LAKIP Deputi Bidang Persidangan dan melakukan pengelolaan Akuntabilitas dengan melakukan pelatihan SDM terkait pengelolaan Akuntabilitas (Diklat SINCAN, SICAPUT dan Aplikasi SAKTI serta penyusunan Perjanjian Kinerja)
5. Melakukan penguatan di Bidang Pengawasan dengan penerapan ZI WBK pada 2 unit (Biro BKSAP dan Biro Persidangan II), peningkatan budaya kerja sadar resiko (risk register), implementasi SPIP dan pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di lingkup Deputi Bidang Persidangan
6. Melakukan penyusunan standar pelayanan, melakukan integrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), pengembangan SIPERDANA dan pengembangan Integrasi E-Media

Dalam rangka mewujudkan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi di Deputi Bidang Persidangan ke arah yang lebih baik, APIP Sekretariat Jenderal DPR RI merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut

1. Saran perbaikan untuk aspek **pemenuhan**, yaitu:
  - a. Komponen area 7, Penguatan Pengawasan. Rekomendasi yang diberikan untuk sub komponen di bawah ini, yaitu:
    - Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



- Agar menyusun laporan berkala terkait monitoring dan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI).
  - Penanganan benturan kepentingan
  - Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan di Deputi Persidangan serta sosialisasi melalui media sosial.
- b. Komponen area 8, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Rekomendasi yang diberikan untuk sub komponen di bawah ini, yaitu:
- **Standar Pelayanan**  
Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan Deputi Bidang Persidangan yang dilakukan dengan melibatkan *stakeholders*.
  - **Budaya pelayanan prima**
    - 1) Menghubungkan seluruh informasi tentang pelayanan dengan sistem informasi pelayanan publik nasional.
    - 2) Seluruh layanan Deputi Bidang Persidangan harus memiliki standar pelayanan sesuai Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dengan memiliki sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan.
    - 3) Seluruh layanan Deputi Bidang Persidangan dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sesuai Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
    - 4) Membuat inovasi pelayanan Deputi Bidang Persidangan yang dapat direplikasi oleh instansi lain.
2. Saran perbaikan untuk aspek **reform**, yaitu:
- a. **Komponen area 4 Penataan Tatalaksana, pada sub komponen Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat**, merekomendasikan untuk melakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan terhadap

penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses utama, bidang administrasi, dan bidang pelayanan publik bagi unit kerja.

- b. **Komponen area 5, Penataan Sistem Manajemen SDM, pada sub komponen Pelanggaran Disiplin Pegawai,** merekomendasikan untuk memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
- c. **Komponen area 6, Penguatan Akuntabilitas, pada sub komponen Efektifitas dan Efisiensi Anggaran** merekomendasikan agar meningkatkan persentase anggaran yang di-*refocussing* untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi.

#### g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 34**

#### **Perbandingan pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Deputi Bidang Persidangan	A	AA	116,050 %	40.215.877.000,-	39.719.335.000,-	98,77

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Terwujudnya tata kelola pemerintah di Deputi Bidang Persidangan yang beekualitas” dengan indikator kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan” telah diselenggarakan dengan efesian dan efektif. Sasaran program dengan indikator kiterja tersebut sudah sesuai dengan target

dengan capaian sebesar 116.05% dengan implementasi anggaran mencapai 98,77%

### 3.5. Nilai Evaluasi SAKIP di Lingkup Deputi Bidang Persidangan

#### a. Target dan Realisasi

Sasaran Program		Indikator	
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	2.	Nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan
<b>Target</b>		B	Capaian Tercapai
<b>Realisasi</b>		B	

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus terukur sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sesuai Peraturan Menteri Pan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari evaluasi SAKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil penghitungan dalam evaluasi SAKIP dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi, dalam hal ini adalah Tim Pengawas Internal (Inspektur II Setjen DPR RI).

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Pengawas Internal (TPI), sesuai surat Nomor 441/PI.03.02/08/2022, tanggal 15 Agustus 2022, perihal: Hasil Evaluasi Internal atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang

Persidangan Tahun 2022 memperoleh nilai 69,65 atau Predikat B (Baik), dengan rincian sebagai berikut

**b. Pencapaian Perbandingan Kinerja**

**Tabel 35**

**Persandingan Kineja Nilai Sakip Tahun 2021 dan 2022**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot		Nilai	
		2021	2022	2021	2022
<b>A</b>	Perencanaan Kinerja	15,00	30,00	8,38 (55,89%)	22,80 (76,00%)
<b>B</b>	Pengukuran Kinerja	12,50	30,00	9,53 (76,25%)	21,00 (70,00%)
<b>C</b>	Pelaporan Kinerja	7,50	15,00	5,08 (67,68%)	9,6 (64,00%)
<b>D</b>	Evaluasi AKIP Internal	0,00	25,00	0,00 (0,00%)	16,25 (65,00%)
	Nilai Hasil Evaluasi	<b>35,00</b>	<b>100</b>	<b>22,99</b> <b>(65,69%)</b>	<b>69,65</b> <b>(69,65%)</b>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja			<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber: Surat dari TPI, Hasil atas Evaluasi AKIP Tahun 2022

Berdasarkan nilai evaluasi SAKIP tersebut di atas, implementasi SAKIP tahun 2022 di lingkungan Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI mengalami kenaikan sebesar 6,03% dibandingkan tahun 2021.

Tabel 36

## Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil pencapaian realisasi nilai evaluasi SAKIP Deputi Bidang Persidangan telah sesuai dengan target. Ini menunjukan bahwa Deputi Bidang Persidangan telah mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Tabel 37

## Persandingan Capaian Nilai Evaluasi SAKIP di Deputi Bidang Persidangan Tahun 2020-2022

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B	100%	B	B	100%	B	B	100%

Berdasarkan tabel diatas, bahwa nilai evaluasi SAKIP di lingkungan Deputy Bidang Persidangan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 memiliki predikat B, hal ini berarti telah memenuhi target capaian indikator kinerja sebesar 100%. Meski telah memenuhi target, namun dikarenakan dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19) pada tahun 2020 yang masih dirasakan hingga tahun 2022, maka mengakibatkan adanya pengurangan anggaran di Deputy Bidang Persidangan, namun akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Persidangan tidak mengalami perubahan. Namun demikian Deputy Bidang Persidangan akan berupaya maksimal untuk melakukan peningkatan capaian nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2023 dan di tahun-tahun selanjutnya.

**c. Capaian dan Target Jangka Menengah**

**Tabel 38**

**Persandingan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2021 dan 2022**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2021	2022
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputy Bidang Persidangan	<b>B</b> <b>22,99</b> <b>(65,69%)</b>	<b>B</b> <b>69,65</b> <b>(69,65%)</b>

Pada tahun 2022, nilai Evaluasi SAKIP Deputy Bidang Persidangan mengalami kenaikan sebesar 6,03% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Deputy Bidang Persidangan telah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya perbaikan.

**Tabel 39**  
**Persandingan Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2022 dan 2024**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Target 2024	Tingkat Kemajuan
Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan	B (69,65)	A (80,01)	87,05 %

Dari tabel di atas capaian indikator kinerja Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan jika diproyeksikan dengan target akhir tahun 2024 dengan perolehan predikat A, maka tingkat kemajuan mencapai 87,05%

**d. Perbandingan Hasil Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

**Tabel 40**  
**Persandingan Kinerja Indeks SAKIP Tahun 2022**  
**Dan Standar Nasional**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Standar Nasional 2022	% Capaian
Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan	69,65	71,30	97,69 %

Pada tahun 2021, tercatat bahwa nilai rata-rata SAKIP pada Kementerian/Lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75. Rata-rata standar nasional sesungguhnya belum bisa dicapai dari hasil perolehan SAKIP Setjen DPR RI yaitu 65,31 (predikat B). Dengan perolehan SAKIP Deputi Bidang Persidangan yang sangat baik pada tahun 2022, diharapkan dapat mempertahankan hasil penilaian SAKIP Setjen DPR RI pada tahun mendatang.



e. Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Ketidakberhasilan

Tabel 41

Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisa Keberhasilan	Upaya yang dilakukan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B	100%	Faktor penyebab keberhasilan adalah: Komitmen dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dari tahun sebelumnya	1. Menyusun Rencana Aksi 2. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi internal di tahun berikutnya

Berdasarkan tabel diatas, keberhasilan Deputi Bidang Persidangan meraih capaian 100% pada nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan disebabkan adanya komitmen dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dari tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan guna meningkatkan capaian indikator kinerja tersebut adalah dengan menyusun Rencana Aksi sesuai *Timeline* dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi internal di tahun berikutnya

Tabel 42

Persandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Renstra	2022
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B

Deputi Bidang Persidangan telah melakukan langkah-langkah perbaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN dan RB, antara lain:

- a melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan RB. Umumnya dilaksanakan setiap pekan di hari Rabu;
- b melakukan pelatihan secara berkesinambungan mulai dari penyusunan Perjanjian Kinerja, SKP, anggaran, hingga agen perubahan;
- c melaksanakan pencapaian monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik;
- d melaksanakan sosialisasi kegiatan dan kinerja DPR RI kepada masyarakat;
- e memanfaatkan *website*, media cetak, dan media sosial yang dimiliki untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan dan kinerja DPR RI.

#### f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 43**

#### **Perbandingan pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Nilai evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B	100%	40.215.877.000	39.719.335.000	98,77

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas” dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut sudah sesuai dengan target capaian sebesar 100% dan dengan implementasi anggaran mencapai 9,77%

#### **g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja**

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Deputi Bidang Persidangan selama Tahun 2022 antara lain:

1. Melakukan publikasi dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan Kinerja (LAK) Deputi Bidang Persidangan pada *website* [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)
2. Menyusun rencana aksi secara triwulan dengan mencantumkan:
  - a. target secara periodik;
  - b. sub kegiatan;
  - c. monitoring pencapaian kinerja.

Berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 9 September 2021 yang ditujukan kepada seluruh Eselon I dan II untuk menyusun Rencana Aksi atas PK maka dilakukan tindak lanjut dengan mengunggah hasil monitoring Pencapaian Kinerja pada *website* [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). dan menyusun fitur Rencana Aksi di Aplikasi PK/PPKP (Portal DPR RI)

3. Melakukan reuiu internal terhadap Rencana Strategis (Renstra) secara berkala (revisi rencana strategis)

Deputi Bidang Persidangan telah melakukan revisi Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 dengan melengkapi sasaran strategis beserta indikatornya yang disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi sesuai

Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPRRI.

4. Melengkapi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) dengan membandingkan realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya serta membandingkan realisasi tahun berjalan dengan rencana strategis.
5. Melakukan penyelarasan antara rencana strategis, perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama.

### 3.6. Realisasi Anggaran

#### a. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI

**Tabel 44**  
**Realisasi Anggaran Satker Setjen Tahun 2022**

No.	UNIT KERJA	DIPA 2022 (REVISI)	REALISASI	%
<b>01</b>	<b>DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN</b>	<b>200.805.791.000</b>	<b>198.219.778.187</b>	<b>98,71%</b>
1	Biro Persidangan I	11.069.833.000	10.940.622.120	98,83%
2	Biro Persidangan II	2.929.994.000	2.886.479.360	98,51%
3	Biro KSAP dan Organisasi Internasional	4.648.131.000	4.647.177.365	99,98%
4	Biro Kesekretariatan Pimpinan	11.502.735.000	11.060.660.451	96,16%
5	Biro Pemberitaan Parlemen	129.593.239.000	128.538.524.919	99,19%
6	Biro Humas dan Protokol	41.061.859.000	40.146.313.972	97,77%
<b>02</b>	<b>DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI</b>	<b>1.158.578.591.000</b>	<b>1.154.416.802.959</b>	<b>99,64%</b>
1	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	3.627.938.000	3.622.458.516	99,85%
2	Biro Sumberdaya Manusia Aparatur	13.758.754.000	13.693.199.213	99,52%
3	Biro Umum	281.631.913.000	280.495.361.844	99,60%
4	Biro Organisasi dan Perencanaan	10.591.138.000	10.582.177.435	99,92%
5	Biro Keuangan	243.997.383.000	241.291.122.423	98,89%
6	Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	604.971.465.000	604.732.483.528	99,96%
<b>03</b>	<b>INSPEKTORAT UTAMA</b>	<b>7.534.370.000</b>	<b>7.520.929.143</b>	<b>99,82%</b>
1	Inspektorat I	2.743.108.000	2.729.670.575	99,51%
2	Inspektorat II	4.791.262.000	4.791.258.568	100,00%
<b>04</b>	<b>PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>10.514.155.000</b>	<b>10.392.858.161</b>	<b>98,85%</b>
<b>05</b>	<b>PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI</b>	<b>72.748.422.000</b>	<b>72.318.551.744</b>	<b>99,41%</b>
<b>06</b>	<b>BADAN KEAHLIAN</b>	<b>49.760.708.000</b>	<b>49.555.546.664</b>	<b>99,59%</b>
1	Pusat PUU	20.647.363.000	20.482.738.302	99,20%
2	Pusat Panlak UU	5.323.600.000	5.319.388.010	99,92%
3	Pusat Kajian Anggaran	5.691.230.000	5.690.385.194	99,99%
4	Pusat KAKN	6.738.000.000	6.734.103.529	99,94%
5	Pusat Penelitian	11.360.515.000	11.328.931.629	99,72%
<b>TOTAL</b>		<b>1.499.942.037.000</b>	<b>1.492.424.466.858</b>	<b>99,50%</b>

**Tabel 45**

### Persandingan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Persidangan Satker Setjen

Tahun	Pagu (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	%
2021	195.768.361.000	190.664.388.538	97,39%
2022	200.805.791.000	198.219.778.187	98,71%

**Gambar 9**  
Persandingan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Persidangan  
Satker Setjen



Realisasi anggaran Deputi Bidang Persidangan tahun 2022 mencapai Rp198.219.778.187,00 atau 98,71% dari Pagu anggaran sebesar Rp200.805.791.000,00. Realisasi tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang hanya mencapai 97,39% dari pagu Rp195.768.361.000,00. Kunci keberhasilan atas kinerja anggaran tersebut adalah monitoring dan optimalisasi anggaran.

Pasca berakhirnya triwulan III, Deputi Bidang Persidangan langsung mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan monitoring kinerja anggaran. Unit kerja mana yang kinerjanya kurang optimal, kemudian dikonfirmasi rencana kegiatan di triwulan IV, selanjutnya dilakukan evaluasi atas sisa anggaran yang tersedia. Saat suatu unit kerja kurang optimal dalam melakukan realisasi anggaran, maka akan direalokasi ke unit kerja yang membutuhkan.

Realisasi anggaran tertinggi di lingkup Deputi Bidang Persidangan dihasilkan oleh Biro KSAP dan Organisasi Internasional. Anggaran Biro KSAP dan Organisasi Internasional sangat mendominasi di Deputi Bidang Persidangan dengan porsi sebesar 99,98%. Dengan demikian, kinerja Deputi Bidang Persidangan sangat dipengaruhi oleh kinerja Biro KSAP dan Organisasi Internasional. Selanjutnya diikuti oleh Biro Pemberitaan dan Parlemen sebesar 99,19%, Biro Persidangan I sebesar 98,83%, Biro Persidangan II sebesar 98,51%, Biro Protokol dan Humas sebesar 97,77%, dan yang terakhir Biro Kesekretariatan Pimpinan sebesar 96,16%.

Realisasi anggaran Biro KSAP dan OI sebagian besar digunakan untuk kegiatan perumusan bahan kebijakan Biro KSAP, fasilitas kerjasama organisasi internasional, regional, bilateral, dan administrasi kegiatan luar negeri anggota, pengiriman penerjemah dalam rangka pengembangan SDM, dan kegiatan-kegiatan pendidikan serta seminar di daerah dan luar negeri, serta pelaksanaan pengiriman delegasi Setjen DPR RI ke Sidang IPU untuk menghadiri pertemuan *Association of secretaries General of Parliaments*.

Realisasi anggaran Biro Pemberitaan Parlemen sebagian besar digunakan untuk penayangan berita di TV dan radio nasional, penayangan berita di media cetak dan media sosial, penyusunan strategi dan komunikasi DPR RI, dan digitalisasi majalah dan bulletin parlementaria.

Realisasi anggaran Biro Persidangan I sebagian besar digunakan untuk pelaksanaan persidangan paripurna, peningkatan pelayanan persidangan di komisi, dan penyusunan risalah rapat.

Realisasi anggaran Biro Protokol dan Humas sebagian besar digunakan untuk kegiatan pendampingan protokol Pimpinan dan Anggota DPR RI, layanan *lounge* bandara dan kereta, kegiatan parlemen remaja dan parlemen kampus, penerimaan delegasi masyarakat, peningkatan kehumasan, peningkatan layanan museum, arsip, dan perpustakaan.

Realisasi anggaran Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagian besar digunakan untuk kegiatan dukungan Pimpinan DPR RI, Pimpinan Setjen DPR RI, dan tata persuratan.

Realisasi anggaran Biro Persidangan II sebagian besar digunakan untuk peningkatan pelayanan persidangan di badan, mahkamah, dan panitia khusus.

#### **b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Berdasarkan tabel 41 alokasi anggaran Deputy Bidang Persidangan sepanjang tahun 2022 dialokasikan sekitar 73% untuk mencapai sasaran “Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputy Bidang Persidangan”. Adapun lokasi anggaran untuk memenuhi sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintah di Setjen DPR RI yang berkualitas” dan “Terwujudnya tata kelola pemerintah di Deputy Bidang Persidangan yang berkualitas” masing-masing 7% dan 20%. *Stakeholder* utama dari Deputy Bidang Persidangan adalah Anggota DPR RI, sehingga sebagian besar pengalokasian anggaran untuk memenuhi kepuasan Anggota DPR RI sudah tepat. Tugas utama Deputy Bidang Persidangan adalah memberikan dukungan layanan Persidangan bagi Anggota DPR RI, dan layanan persidangan tersebut dilakukan oleh enam unit kerja setingkat Eselon II yang berada di bawah Deputy Bidang Persidangan, yaitu Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro KSAP, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Protokol dan Humas, dan Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Deputy Bidang Persidangan berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dan capaian dapat dikatakan efisien apabila suatu organisasi atau unit kerja



mampu mencapai kinerja yang optimal dengan anggaran yang minimal. Deputi Bidang Persidangan mampu mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi anggaran kurang dari 100% (Tabel 34). Deputi Bidang Persidangan senantiasa meningkatkan kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang diberikan secara berkesinambungan berapapun alokasi anggaran yang tersedia. Deputi Bidang Persidangan menyadari bahwa kinerja yang diberikan menjadi cerminan wajah dari Setjen DPR RI

**Tabel 43**  
**Realisasi Anggaran per Sasaran Program Tahun 2022**  
(dalam ribu rupiah)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Real	Pagu*)	Real*)	%
01	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga	A	BB	14.299.356	13.926.594	97,39 %
		Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif	Informatif			
02	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3.24	3.31	146.290.558	144.573.849	98,82%
03	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	A	AA	40.215.877	39.719.335	98,77 %
		Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan	B	B			

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI serta Amanat Reformasi Birokrasi, Khususnya Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Persidangan telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban dan wujud transparansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, alat penilaian kinerja, serta sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu, Deputi Bidang Persidangan terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Banyak pencapaian positif yang telah dihasilkan oleh Deputi Bidang Persidangan beserta jajaran pada tahun 2022 yang menggambarkan kerja keras dan profesionalitas Deputi Bidang Persidangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini berkontribusi positif terhadap pencapaian target Deputi Bidang Persidangan dalam mewujudkan visi dan misi Setjen DPR RI.

Pada tahun 2022, nilai Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Persidangan adalah 69,65%, mengalami kenaikan sebesar 6,03% dari tahun sebelumnya sebesar 65,69%. Ini menunjukkan bahwa Deputi Bidang Persidangan secara konsisten melakukan berbagai perbaikan, sebagaimana rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Setjen DPR RI.

Hal ini selaras dengan Hasil Evaluasi Internal atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 yang memperoleh nilai **46,43** atau sebesar **92,86%** dengan kategori

“AA” (Istimewa) dengan target Indeks RB Deputy Bidang Persidangan pada katagori “A” sehingga capaian untuk Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Persidangan adalah “Tercapai”. Jika dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Persidangan pada tahun 2021, yaitu dengan nilai skor 77,19% dengan kategori “BB”, maka nilai Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Persidangan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 20,30%.

Adapun untuk capaian Nilai Hasil pengawasan di Bagian Kearsipan Setjen DPR RI tahun 2022 adalah 77,99 (tujuh puluh tujuh koma sembilan sembilan) dengan kategori “BB (Sangat Baik)” yaitu mengalami kenaikan sebesar 6,7% dari tahun sebelumnya sebesar 73,08 namun demikian belum dapat mencapai target kategori A sebagaimana yang diharapkan.

Berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), telah dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas KIP DPR RI. Yang menjadi nilai lebih KIP DPR RI adalah pada aspek inovasi layanan PPID Setjen DPR, yakni dengan adanya Layanan Ramah Disabilitas. Hal ini menghasilkan prestasi PPID Setjen DPR RI, berhasil mempertahankan peringkat sebagai Badan Publik informatif dengan nilai 98,13 dan DPR RI berada di urutan keenam dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Di akhir Tahun 2022, dalam rangka untuk mengetahui penilaian Anggota DPR RI atas kinerja Deputy Bidang Persidangan, dilakukan Survei Kepuasan terhadap 231 orang Anggota DPR RI dari 9 fraksi mengenai Kinerja dan Layanan Deputy Bidang Persidangan tahun 2022. Hasil survei mengenai Kinerja dan Layanan Deputy Bidang Persidangan memperoleh nilai indeks 3,31 dengan nilai interval sebesar 82,72 dan masuk kategori “Baik”. Nilai tersebut di atas target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

Selain itu, realisasi anggaran Deputy Bidang Persidangan tahun 2022 mencapai Rp198.219.778.187,00 atau 98,71% dari Pagu anggaran sebesar Rp200.805.791.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp.190.664.388.538,00

atau 97,39% dari pagu sebesar Rp195.768.361.000,00. Kunci keberhasilan atas kinerja anggaran tersebut adalah monitoring dan optimalisasi anggaran di lingkungan Deputi Bidang Persidangan.

Prestasi lainnya di tahun 2022 adalah Deputi Bidang Persidangan telah sukses sebagai sistem pendukung atas penyelenggaraan sebagai tuan rumah dua sidang internasional, yaitu: *The 144<sup>th</sup> IPU Assembly & Related Meeting* yang diselenggarakan tanggal 20 sampai dengan 24 Maret 2022 di Bali dan *The 8<sup>th</sup> G20 Parlimamentary Speakers' Summit (P20)* yang dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 7 Oktober 2022 di Jakarta.

Besarnya skala kegiatan dan waktu pelaksanaan di masa pandemi, serta keterbatasan anggaran akibat kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran secara nasional merupakan tantangan sekaligus prestasi yang membanggakan atas suksesnya penyelenggaraan kedua sidang tersebut.

#### 4.2. Rekomendasi

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Persidangan untuk meningkatkan kinerja di Tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. pengembangan teknologi informasi (TI) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada DPR RI dan masyarakat, yaitu dengan transparansi informasi dan kinerja kegiatan parlemen di *website* DPR RI, serta berbagai inovasi dan penyempurnaan aplikasi sistem kerja modern yang efektif dan efisien yang mendukung *supporting system* menuju parlemen yang modern;
2. peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang unggul dan memiliki penguasaan substansi untuk penguatan dukungan keahlian kepada DPR RI dengan tetap menerapkan nilai budaya kerja Setjen DPR RI, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) guna mendukung kinerja DPR RI;
3. komitmen pimpinan di lingkungan Setjen DPR RI untuk mengimplementasikan Persekjen DPR RI No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan arsip dinamis

di unit-unit pengolah sesuai standar pedoman kearsipan. Selain itu melakukan pembinaan kearsipan ke unit-unit pengolah dan bimbingan teknis kearsipan untuk pegawai Setjen DPR RI. Perlu dilakukan penyusunan SOP tentang kearsipan di lingkungan Setjen DPR RI dan melakukan pengembangan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi di unit-unit pengolah guna mendukung pengelolaan arsip yang baik agar pelayanan arsip kepada pemangku kepentingan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat.

4. seluruh unit kerja di lingkungan Deputi bidang Persidangan untuk menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan terus berinovasi dalam memberikan layanan kepada pemangku kepentingan agar seluruh unit kerja dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2023  
Plt. Deputi Bidang Persidangan



Suprihartini, S.IP., M.Si.

## LAMPIRAN

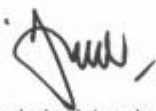
## Perjanjian Kinerja Tahun 2022

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A
		2. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik	Informatif
2.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Deputi Bidang Persidangan	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan	3,24
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang Persidangan yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan	A
		2. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkungan Deputi Bidang Persidangan	B

Program	Anggaran
Dukungan Manajemen	Rp202.655.067.000,-

Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si  
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 21 Desember 2021  
Deputi Bidang Persidangan,



Dra. Damayanti, M.Si  
NIP. 19620211 198703 2 002



## Surat Tugas Tim Penyusun LKj Deputi Bidang Persidangan



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT TUGAS**  
**Nomor : B/003/DP/01/2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyusun Buku Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022 perlu membentuk Tim Penyusunan Buku Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022;
  - b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Buku Laporan Deputi Bidang Persidangan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Surat Tugas Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  - c. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39)
  - d. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
  - e. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024.
  - f. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dipindai dengan CamScanner



**MENUGASKAN:**

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Suprihartini, S.IP., M.Si	197101061990032001	Pengarah
2.	Rachmi Suprihartanti Septiningtyas., S.H., M.H.	196709251994032002	Ketua
3.	Puji Lestari, SE	197806261998032002	Sekretaris
4.	Nofia Dewita., S.S., M.Si	196711081996032001	Anggota
5.	Dra. Etmita Ardem., M.Si	196402101998032001	Anggota
6.	Rosdiana., S.H., M.H.	198006092002122002	Anggota
7.	Eguh Setiawan, S.IP	197202221993021001	Anggota
8.	Sagung Agung Putri S.Y., S.H., M.H.	197209302000032002	Anggota
9.	Siti Nur Aidah., S.A.P., M.A.P	197403081996032001	Anggota
10.	Haryanti., S.A.B., M.A.P	197903281999032001	Anggota
11.	Aji Nurhadi Wibowo, S.E., M.A.P	198003232005021003	Anggota
12.	Eny Sulistiowati, S.Kom	197410051997032002	Anggota
13.	Tenny Rosanti., S.Sos., M.Si	197505172000032003	Anggota
14.	Tuti Alawiyah, A.Md, D.Tr.AP	197412011997032003	Anggota
15.	N.A.A. Titie Budi Setyawati, S.E., M.E.	197510151995022001	Anggota
16.	Aprilia Dessy Kurniati, S.E	198506292003122001	Anggota
17.	Dicky Rachmadi., S.A.P	198109042001121002	Anggota
18.	Nita Juwita, S.Sos	198110182005022001	Anggota
19.	Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom., M.A.	198607262014021003	Anggota
20.	Husnul Latifah., S.Sos	197207181997032001	Anggota
21.	M. Chairudin, S.Sos., M.M	197409271998031003	Anggota
22.	Agus Budi Leksono, S.A.P	197708151998031005	Anggota
23.	Renaldi Setiawan, S.IP.	198410102005021001	Anggota
24.	Abdul Rahman	196806221994031005	Anggota/Sekretariat
25.	Wilda Narsella Kappuw., A.Md	199203292022022001	Anggota

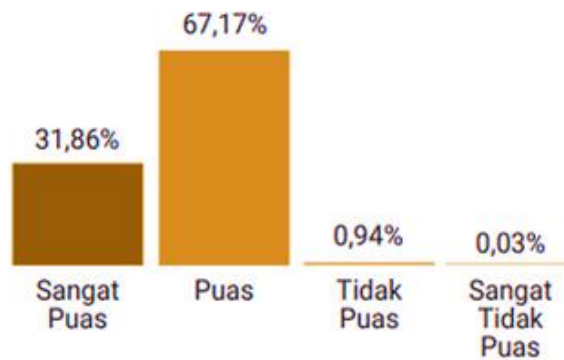
Untuk : melaksanakan tugas menyusun Buku Laporan Kinerja Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 dan melaksanakan tugas mulai bulan Januari sampai dengan Februari 2023.

Jakarta, 6 Januari 2023  
Plt. Deputy Bidang Persidangan,

  
**Suprihartini, S.IP., M.Si**  
NIP. 197101061990032001



### Hasil Survei Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan



Indeks Kepuasan Responden untuk Layanan Deputi Bidang Persidangan

Indeks Kepuasan	Skor	F	%	Urutan	Nilai
Sangat Puas	4	1.251	31,86	2	5.004
Puas	3	2.637	67,17	1	7.911
Tidak Puas	2	37	0,94	3	74
Sangat Tidak Puas	1	1	0,03	4	1
<b>Jumlah</b>		<b>3.926</b>	<b>100,00</b>		<b>12.990</b>
				<b>NI</b>	<b>3,31</b>
				<b>NIK</b>	<b>82,72</b>

## Akreditasi A Perpustakaan DPR RI

Perpustakaan DPR RI telah dua kali menjalani asesmen akreditasi perpustakaan yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Asesmen pertama dilakukan di tahun 2019 dengan hasil “Terakreditasi B”. Di tahun 2022 Perpustakaan DPR RI mengajukan akreditasi untuk yang kedua kali. Asesmen akreditasi kedua memberikan hasil “Terakreditasi A”. Sertifikat akreditasi berlaku selama lima tahun, mulai tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan 24 Februari 2027.



## Peringkat Informatif Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR RI) mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Anugerah Keterbukaan Informasi ini diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB bertempat di Atria Hotel, Gading Serpong, Tangerang, Banten. Pada gelaran tahun 2022, PPID Setjen DPR RI berhasil mempertahankan peringkat **Informatif** dengan nilai 98,13 dengan komponen penilaian kuesioner mandiri sebesar 84,83 dari 85,00.



## Penganugerahan PR Indonesia Awards 2022

Museum DPR RI mengajukan program Pameran Daring "*Komite Nasional Indonesia Pusat: Mukadimah Parlemen Indonesia*" yang diadakan pada tahun 2021 untuk dilombakan bersama program-program lembaga pemerintah lainnya dalam ajang **Public Relations Indonesia Awards 2022**. Setelah melalui tahap administrasi dan penjurian, pada tanggal 25 Maret 2022, bertempat di Po Hotel Semarang, program Pameran Daring "*Komite Nasional Indonesia Pusat: Mukadimah Parlemen Indonesia*" oleh Museum DPR RI,



berhasil meraih penghargaan **Bronze Winner** Kategori Lembaga, Sub Kategori Government PR dalam ajang Public Relations Indonesia Awards 2022.





PUBLIC  
RELATIONS  
INDONESIA  
AWARDS  
2022

PAMERAN DARING  
**"KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT:  
MUKADIMAH PARLEMEN INDONESIA"**  
MENDAPAT PENGHARGAAN BRONZE WINNER DALAM AJANG  
PUBLIC RELATIONS INDONESIA AWARDS 2022



TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI DAN  
DUKUNGAN DARI #KAWANMUSEUMDPR

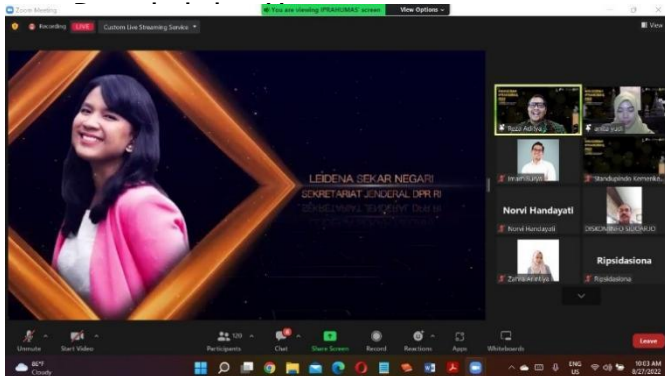


@museumdpr

[museum.dpr.go.id/tour](https://museum.dpr.go.id/tour)

## Anugerah IPRAHUMAS Indonesia

Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) menyelenggarakan Anugerah Iprahumas 2022 (AI 2022) sebagai bentuk apresiasi bagi instansi, pranata humas, dan tokoh humas nasional yang memberikan sumbangsih bagi kemajuan kehumasan pemerintah secara nasional dan Iprahumas secara khusus. Berdasarkan hasil seleksi dan administrasi yang diumumkan secara online melalui zoom meeting dan disiarkan secara live melalui youtube Iprahumas Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2022, Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan Award di Anugerah Iprahumas 2022 kategori Pranata Humas Ahli Pertama yang dimenangkan oleh Leidena Sekar Negari pegawai Biro



## Penghargaan Indonesia Award 2022 dari I-News untuk Kategori Digital Transformation





**Penghargaan dari Radio Sonora Kategori Excellent Government Appreciation Award Tahun 2022**



**Penghargaan Elshinta Award Kategori Mitra Kontributif**



**Radio Parlemen oleh Spotify Dinobatkan Sebagai Konten Kreator Berita Paling Produktif Sepanjang Tahun 2022**

